



Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2023

**Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan
Pontianak**

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kegiatan pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak Triwulan III Tahun 2023 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target, disamping beberapa capaian indikator yang belum maksimal dalam mencapai target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2023 Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak.

LKj Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan III Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada Stasiun PSDKP Pontianak dalam kurun waktu Triwulan III tahun 2023. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kedepan.

Kami berharap, Laporan kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf Stasiun PSDKP Pontianak dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak dapat terus ditingkatkan.

Pontianak, 16 Oktober 2023
Kepala Stasiun PSDKP Pontianak



Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan III Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja serta telah diintegrasikan dengan Balanced Scorecard (BSC). Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Stasiun PSDKP Pontianak kepada Direktur Jenderal PSDKP, atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Stasiun PSDKP Pontianak telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Dalam perspektif BSC Stasiun PSDKP Pontianak telah menetapkan 7 Sasaran Strategis (SK), yaitu: ⁽¹⁾ Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat; ⁽²⁾ Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan; ⁽³⁾ Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan; ⁽⁴⁾ Terselenggaranya Pemantauan dan operasi armada SDKP; ⁽⁵⁾ Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP; ⁽⁶⁾ Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan; ⁽⁷⁾ Tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Isu Aktual Pengawasan Stasiun PSDKP Pontianak.....	2
1.4 Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Pontianak.....	2
1.5 Sistematika Penyajian.....	7
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024.....	10
2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023.....	11
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	12
2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023.....	16
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
3.1 Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2023.....	17
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	20
1. IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas.....	21
2. IKU Indek kinerja Speed Boat Pengawas.....	24
3. IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%).....	27
4. IKU IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%).....	37
5. IKU Persentase penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan.....	47
6. Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan.....	50
7. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	50
8. IKM Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	52
9. IKM .Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	54

10. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	56
11. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan....	59
3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak dengan Satker UPT Sejenis/Setara.....	60
3.4. Akuntabilitas Keuangan	63
BAB 4 PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan.....	66
4.2 Rekomendasi.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1 Komposisi Sumber Daya Manusia	3
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2023.....	14
Tabel 3. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja.....	18
Tabel 4. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023.....	20
Tabel 5. Perhitungan Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan III Tahun 2023	30
Tabel 6. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Operasi Kapal Pengawas ..	30
Tabel 7. Perhitungan Indeks Kinerja Operasi Speedboad Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan III Tahun 2023	37
Tabel 8. Perbandingan Target dan Capaian Indeks operasi Speed Boat Pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	27
Tabel 9. Pelaku Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi	28
Tabel 10. Pelaku usaha yang diawasi kegiatan destructive fishing	30
Tabel 11. Pengawasan Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya (Pencemaran) sampai bulan September 2023.....	32
Tabel 12. Pengawasan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut	38
Tabel 13. Perbandingan Target dan Capaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan III tahun 2020-2024	38
Tabel 14. Rekapitulasi Pelaku usaha unit usaha pembudidayaan ikan	38
Tabel 15. Tahapan pemeriksaan Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor pengolahan dan pemasaran ikan	39
Tabel 16. Rekapitulasi P Rekapitulasi pengawasan pengawasan sektor perikanan berbasis resiko sampai dengan bulan September 2023	39
Tabel 17. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	44
Tabel 18. Rekapitulasi Penyelesaian Pengenaan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	46
Tabel 19. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Penyelesaian Penanganan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Pontianak ..	47
Tabel 20. Perkembangan Proses Hukum Tindak Pidana Perikanan Sampai Dengan Bulan September 2023	48
Tabel 21. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	49

Tabel 22. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	52
Tabel 23. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	54
Tabel 24. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	56
Tabel 25. Perbandingan Target dan Capaian pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	526
Tabel 26. Perbandingan Target dan Capaian Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	58
Tabel 27. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan	58
Tabel 28. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan.....	60
Tabel 29. Rincian Realisasi Anggaran	64
Tabel 30. Rekomendasi dan tindak lanjut hasil capaian.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Pontianak	3
Gambar 2. Wilayah Kerja	6
Gambar 3. Peta Strategi	13
Gambar 4. Dashboard Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak TW I Tahun 2023....	17
Gambar 5. Perhitungan SKM SLO	51
Gambar 6. Perhitungan SKM LVHPI	54
Gambar 7. Capaian IK unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Perjanjian Kinerja tahun 2023.....	67

1.1 Latar Belakang

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : Permen KP Nomor 33 Tahun 2016 Tentang OTK UPT PSDKP di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fungsi sebagai berikut: ⁽¹⁾ Penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; ⁽²⁾ Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; ⁽³⁾ Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan; ⁽⁴⁾ Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; ⁽⁵⁾ Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan; ⁽⁶⁾ Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas; serta ⁽⁷⁾ Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Peningkatan peran pengawasan terus dilakukan, salah satunya diwujudkan dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja pengawasan SDKP dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Pontianak yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus kegiatan Stasiun PSDKP Pontianak untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang dalam tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan III Tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (sebagai eselon 1 yang menaungi) dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap triwulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

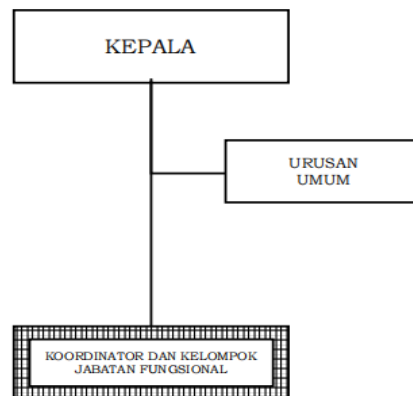
1.3 Isu Aktual Pengawasan Stasiun PSDKP Pontianak

- Maraknya pencurian ikan oleh Kapal Ikan Asing (KIA) dengan berbagai modus operandi yang digunakan
- Penanganan awak kapal (tersangka) dan barang bukti kapal yang ditinggalkan oleh pihak kejaksaan khususnya perkara dalam proses banding/kasasi
- Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII)
- Pemanfaatan Jenis ikan yang dilindungi dan/ atau apendiks CITES yang tidak patuh dengan peraturan yang berlaku
- Perusakan terumbu karang akibat penambangan dan akibat penggunaan alat tangkap yang dilarang
- Kegiatan yang mencemari perairan pesisir dan laut

1.4 Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Pontianak

Kedudukan UPT. Stasiun PSDKP Pontianak dipimpin oleh Seorang Kepala setingkat Eselon IVa yang berada dibawah dan bertanggung Jawab Kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan

STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Pontianak

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang pengawasan SDKP;
2. Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan ;
3. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan SDKP;
5. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan;
6. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

SDM Pengawasan

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Stasiun PSDKP Pontianak pada Tahun 2023 total adalah 82 orang yang tersebar di UPT Satwas/Wilker dan Kapal Pengawas. Dari total 81 orang Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) tersebut, 31 orang adalah Pengawas Perikanan sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 42/KEP-DJPSDKP/2017 tentang Penetapan Pengawas Perikanan Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Tabel 1 Komposisi Sumber Daya Manusia

No	Unit Kerja	Jumlah SDM											
		S T	ST+ PP	F U	FU+ PP	FU+ PO	F P P	FP P+P O	FP P+P P	FP P+P O+ PP	J F T	P D	Jum lah
1	UPT Stasiun PSDKP Pontianak		1	7	1		4	1	3	2	2		21
2	Satwas PSDKP Sambas			1			1	2					4
3	Satwas PSDKP Kayong Utara			4			1			1			6
4	Satwas PSDKP Kota Waringin Barat			2					2				4
5	Wilker PSDKP Sungai Rengas			2		1							3
6	Wilker PSDKP Sungai Kakap												0
7	Wilker PSDKP Mempawah			1									1
8	Wilker PSDKP Entikong					1							1
9	Wilker PSDKP Badau			2						1			3
10	Wilker PSDKP Singkawang							1	1				2
11	Wilker PSDKP Sajingan			1	1								2
12	Wilker PSDKP Jagoi Babang			2									2
13	Wilker PSDKP Ketapang			3			1						4
14	Wilker PSDKP Seruyan			2									2
15	KP. Hiu Macan 01			14	1								15
16	KP. Hiu 11			10	1								11
Jumlah Total												81	

Keterangan :

ST = Struktural

PP = PPNS

FU = Fungsional Umum

PO = Polsus PWP3K

FPP = Fungsional Pengawas Perikanan

PD = Pegawai Dinas

Bangunan Pengawasan

Sarana dan prasarana yang terdapat di Wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak antara lain:

a. Gedung Kantor Pengawasan

Gedung kantor pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang sudah menjadi aset sendiri (terdaftar dalam BMN) antara lain:

1. Kantor Stasiun PSDKP Pontianak (600 M²)
2. Kantor Satwas PSDKP Sambas
3. Kantor Satwas PSDKP Kayong Utara
4. Kantor Satwas PSDKP Kotawaringin Barat
5. Kantor Wilker PSDKP Entikong
6. Kantor Wilker PSDKP Ketapang

Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sampai Tahun 2023 terdapat beberapa Satwas/Wilker yang masih belum dibangun sehingga pihak Stasiun PSDKP Pontianak berkoordinasi dengan Dinas Provinsi/Kabupaten setempat yang terkait dengan Perikanan dan Kelautan untuk pinjam pakai kantor gedung atau ruangan yang digunakan sebagai kantor pengawasan, Satwas/Wilker PSDKP yang dimaksud adalah Wilker PSDKP Sungai Kakap, Wilker PSDKP Sungai Rengas, Wilker PSDKP Mempawah, Wilker PSDKP Singkawang, Wilker PSDKP Jagoi Babang, dan Wilker PSDKP Seruyan. Sedangkan kantor Wilker PSDKP Sajingan dan Wilker PSDKP Badau, statusnya sampai dengan saat ini adalah menyewa rumah milik masyarakat setempat yang difungsikan sebagai kantor pengawasan.

b. *Detention Centre* (DTC)

Detention Center terdapat di Stasiun PSDKP Pontianak digunakan sebagai tempat penampungan sementara awak kapal penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan dengan kapasitas maksimal 160 orang.

c. Dermaga

Dermaga berada di Stasiun PSDKP Pontianak dengan panjang ±100M dan lebar 4M yang digunakan untuk sandar Kapal Pengawas dan digunakan untuk pemeriksaan kapal yang baru diadhock.

d. Gedung Penyimpanan Barang Bukti

Gedung Penyimpanan Barang Bukti terdapat di Pontianak yang digunakan untuk penyimpanan barang bukti Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan berukuran 40 M²

e. Mess Operator

Difungsikan untuk tempat tinggal para Pegawai Negeri Sipil yang standby dan selalu siap siaga di Stasiun PSDKP Pontianak dengan jumlah 8 unit

f. Mess AKP

Difungsikan untuk tempat istirahat bagi Awak Kapal Pengawas dengan jumlah 15 kamar dimana setiap kamar maksimal dihuni oleh 4 orang

g. Kolam Labuh

Difungsikan sebagai tempat labuh kapal kapal hasil pengananan TPP dengan luasan 4.800 M²

Kapal Pengawas

Stasiun PSDKP Pontianak sampai saat ini mengelola 2 unit Kapal Pengawas yaitu KP. Hiu Macan 01 dan KP. Hiu 11 dan 5 unit Speed Boat Pengawasan yang penempatannya dialokasikan pada Stasiun PSDKP Pontianak (2 unit), Satwas PSDKP Kayong Utara (1 unit), Wilker PSDKP Kapuas Hulu (1 unit), dan Satwas PSDKP Sambas (1 unit).

Satwas dan Wilker Pengawasan

Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Pontianak tersebar di 2 provinsi yaitu Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, adapun peta wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak dapat dilihat pada Gambar 2. berikut ini:



Gambar 2. Wilayah Kerja

Wilayah kerja yang menjadi kewenangan Stasiun PSDKP Pontianak adalah WPP 711 dan 712, merupakan daerah *fishing ground* yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati. Seiring dengan terjadinya pengembangan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan per Tanggal 28 Desember 2020 maka wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak berubah menjadi 3 Satwas dan 10 Wilker Pengawasan, yaitu:

- Satwas PSDKP Sambas;
- Satwas PSDKP Kayong Utara;
- Satwas PSDKP Kotawaringin Barat;
- Wilker PSDKP Sungai Rengas;
- Wilker PSDKP Sungai Kakap;
- Wilker PSDKP Mempawah;
- Wilker PSDKP Entikong;
- Wilker PSDKP Kapuas Hulu;
- Wilker PSDKP Singkawang;
- Wilker PSDKP Sajingan;
- Wilker PSDKP Jagoi Babang;
- Wilker PSDKP Ketapang
- Wilker PSDKP Seruyan.

1.5 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak pada dasarnya mengkomunikasikan pencapaian kinerja pada Tahun 2023. Capaian kinerja (*Performance Results*) Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan capaian. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak (sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun berjalan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Evaluasi dan Analisis

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

C. Akuntabilitas Keuangan

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari : Renstra Ditjen PSDKP Tahun 2023, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2023, dan Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2023.

2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapaun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2020-2024. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024 melalui 2 (dua) pendekatan yaitu logical model yang utamanya gunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas dan Kementerian Keuangan serta menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang utamanya digunakan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dan pengukuran kinerja. Pada pendekatan logical model, sasaran disusun secara logis dan terstruktur menjadi: sasaran strategis (K/L) yang menghasilkan dampak (impact), sasaran program (unit eselon I) yang menghasilkan (Outcome), dan sasaran kegiatan (unit eselon

II) yang menghasilkan keluaran (output). Dengan demikian, jika menggunakan pendekatan tersebut, maka sasaran Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024 merupakan sasaran program dari program pengawasan SDKP, yaitu :

- a. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP, dan
- b. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang professional dan partisipatif

2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun PSDKP Pontianak disusun berdasarkan turunan tahunan dari Rencana Strategis Tahun 2020–2024. Penetapan Kinerja (Tapja) Tahun 2023 adalah manifestasi dari Rencana Kerja Tahunan untuk mengukur target dan capaian kinerja. RKT Stasiun Pengawasan PSDKP Pontianak berisikan program kegiatan:

A. Pemantauan dan Operasional Armada;

1. Operasional Kapal Pengawas
2. Kapal Perikanan yang Diperiksa Kapal Pengawas
3. Cakupan WPPNRI yang Dipantau Menggunakan Kapal Pengawas
4. Awak Kapal yang Memperoleh Kesehatan Rutin Tahunan
5. Armada Pengawasan dan Sistem Pemantauan Yang Siap Operasi
6. Kesiapan Sistem Pemantauan SDKP
7. Operasional Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat
8. Kapal Perikanan yang Diperiksa Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat
9. Cakupan WPPNRI yang Dipantau Menggunakan Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat
10. Tindak Lanjut Informasi POKMASWAS
11. Bangunan/ Pos Pengawasan yang dibangun
12. Speed Boat Pengawasan yang dibangun

B. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;

1. Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP
2. Penyelesaian Penanganan Barbuk
3. Penyelesaian Penanganan Awak Kapal

C. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;

1. Jenis Ikan Yang Dilindungi Yang Diawasi Sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku

2. Pelaku Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Yang Patuh terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
 3. Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut Nasional Yang Patuh terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
 4. Pelaku Usaha Perikanan Yang Bebas dari Destructive Fishing
- D. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
1. Kapal Perikanan Yang Laik Operasional
 2. Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang – undangan
 3. Unit Usaha Budidaya Ikan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
 4. Usaha Distribusi Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
- E. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya,
1. Layanan Sarana Dan Prasarana Internal
 2. Layanan Dukungan Manajemen Satker
 3. Layanan Perkantoran

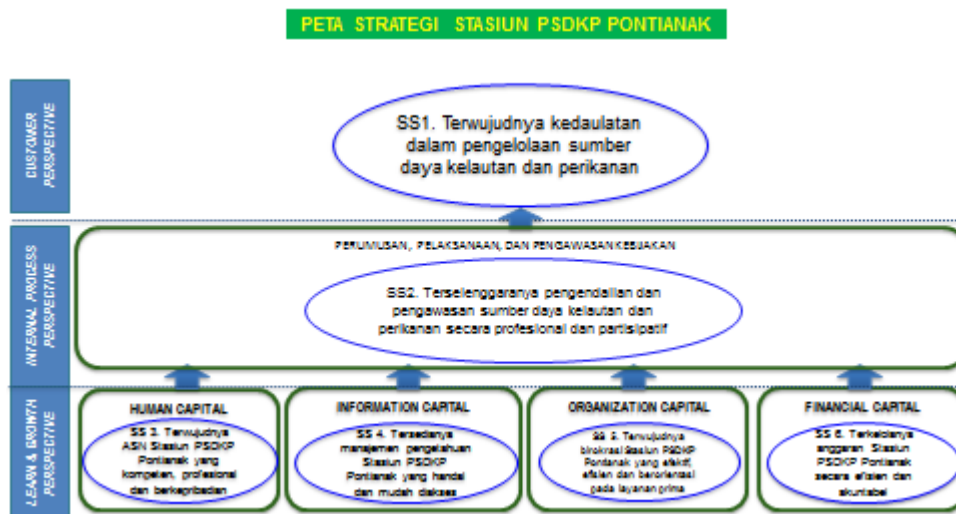
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan ⁽³⁾ Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Stasiun PSDKP Pontianak yang optimal.

Stasiun PSDKP Pontianak telah menerima Perjanjian Kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen. PSDKP, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi kedalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*countinous improvement*)
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Stasiun PSDKP Pontianak menggunakan 3 perspektif dalam BSC, yaitu: *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective*. Digunakannya seluruh *perspective* dalam BSC menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal PSDKP merupakan unit kerja utama dalam BSC (*Core Unit of Balance Scorecard*), bukan sebagai unit kerja pendukung dalam BSC (*supporting unit of Balance Scorecard*). *Stakeholders Perspective* dan *Customer Perspective* dijadikan satu perspektif dengan pertimbangan untuk lebih menonjolkan peran Stasiun PSDKP Pontianak dalam mendukung tercapainya kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan.



Gambar 3. Peta Strategi

Peta strategi Stasiun PSDKP Pontianak menerapkan 3 perspektif, yaitu: *customers perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. *Customers perspective* berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang harus dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada *stakeholder* dan *customer*.

Sedangkan *Learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan.

Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual Indikator Kinerja Utama *Balanced Score Card* (IKU BSC). Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian yang telah diraih dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
1	Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif	1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (Indeks)	80
2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif	2	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	87,6
		3	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	87,6
3	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan	4	Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP (%)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
4	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan yang Sesuai Ketentuan	5	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (%)	100
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
5	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan yang Sesuai Ketentuan	6	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (%)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas	7	Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (%)	80
7	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas	8	Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (%)	93

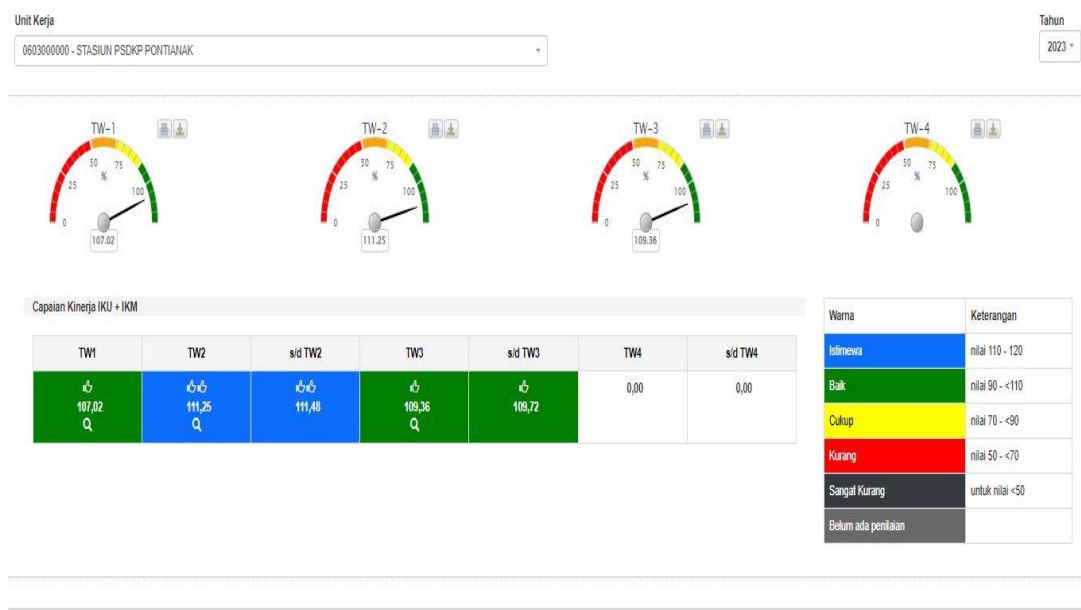
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
8	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP	9	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	80
		10	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	80
		11	Nilai WBK Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	75
		12	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	100
		13	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	78
		14	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	90
		15	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		16	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	21
		17	Jumlah Inovasi yang Dihasilkan Stasiun PSDKP Pontianak (Inovasi)	1
		18	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	92
		19	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	77,5
		20	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	77,5
		21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	89
		22	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	82

2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual IKU BSC. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2023 yang didukung dengan implementasi aplikasi BSC “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi khusus BSC berbasis informasi teknologi.

3.1 Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2023

Berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, Stasiun PSDKP Pontianak telah menyempurnakan dan menetapkan 8 (Delapan) Sasaran Strategis (SS) dengan 22 Indikator Kinerja. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun PSDKP Pontianak yang terdiri dari IKU dan IKM sebesar 109,72%.



Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

Gambar 4. Dashboard Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan III Tahun 2023

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh hasil pengukuran IKU pada setiap Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023	TARGET TW I	REALISASI	%
1	Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif	1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (Indeks)	80	-	-	-
2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif	2	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	87,6	87,6	97,53	111,34
		3	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	87,6	87,6	94,49	107,87
3	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan	4	Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP (%)	100	-	-	-
4	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan yang Sesuai Ketentuan	5	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (%)	100	100	100	100
5	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan yang Sesuai Ketentuan	6	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (%)	100	100	100	100
6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas	7	Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (%)	80	70	100	120
7	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas	8	Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (%)	93	70	100	120
8	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP	9	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	80	80	89,55	111,94
		10	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	80	80	90,41	113,01
		11	Nilai WBK Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	75	-	-	-
		12	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	100	100	100	100
		13	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	78	-	-	-
		14	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	90	-	-	-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	TARGET TW I	REALISASI	%	
		15	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75	75	75	100
		16	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	21	-	-	-
		17	Jumlah Inovasi yang Dihasilkan Stasiun PSDKP Pontianak (Inovasi)	1	-	-	-
		18	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	92	92	93,52	101,65
		19	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	77,5	-	-	-
		20	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	77,5	-	-	-
		21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	89	-	-	-
		22	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	82	-	-	-

Penjelasan warna:

NO	WARNA	KETERANGAN
1		Istimewa (nilai 110-120)
2		Baik (nilai 90-<110)
3		Cukup (nilai 70 - <90)
4		Kurang (nilai 50 - <70)
5		Sangat Kurang (nilai < 50)
6		Belum Ada Penilaian

Penjelasan tentang capaian IKU pada masing-masing Sasaran Strategis tersebut akan dijelaskan pada bagian evaluasi dan analisis capaian kinerja.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Selama periode Triwulan III Tahun 2023 Stasiun PSDKP Pontianak telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Terdapat 11 (Sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan target capaiannya. Evaluasi dan analisis terhadap capaian sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023	TARGET TW III	REALISASI	%
1	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif	1	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	87,6	87,6	97,53	111,34
		2	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	87,6	87,6	94,49	107,87
2	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan yang Sesuai Ketentuan	3	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (%)	100	100	100	100
3	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan yang Sesuai Ketentuan	4	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (%)	100	100	100	100
4	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas	5	Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (%)	80	70	100	120
5	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas	6	Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (%)	93	70	100	120
6	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP	7	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	80	80	89,55	111,94
		8	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	80	80	90,41	113,01
		9	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	100	100	100	100
		10	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75	75	75	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023	TARGET TW III	REALISASI	%
		11	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	92	92	93,52	101,65

1. IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni: a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan; b. Cakupan wilayah pengawasan; c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Untuk mengukur Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot (\%)} \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

Ikp = Indeks kinerja Kapal Pengawas

Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi

Capaian = Realisasi capaian kinerja Kapal Pengawas

Target = Sasaran kinerja Kapal Pengawas

Variabel Pembentuk:

1. Pemeriksaan : Bobot 40%

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal): Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan (kali)]: Bobot 30%
Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]
- Setiap Kapal Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 2 (dua) unit kapal ikan per hari.

2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara;
- Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015).
- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPPNRI.

3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
- Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.

4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 30%
- Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 30%
- Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi: Bobot 40%
- Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Hasil pengukuran indeks kinerja operasi kapal pengawas Triwulan III tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 5. Perhitungan Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan III Tahun 2023

Stasiun	Kapal Pengawas	Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)			Pemeriksaan Kelautan (30%)			Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)			Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)			Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)			Dukungan Kegiatan SAR (40%)			Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (30%)			Pemutusan Rumpon Ilegal (30%)			Dukungan Operasi Bersama (40%)			Dukungan Operasi Lainnya (5%)			Total Nilai Indeks	Nilai per Satker
		TW III			TW III			TW III			TW III			TW III			TW III	TW III			TW III			TW III										
		Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai						
Stasiun PSDKP Pontianak	KP. HIU MACAN 01	124	118	70	0	0	30	40	0.57	0.81	40	0	0	60	0	0	40	15	0	0	0	30	0	0	30	0	0	40	5	100.00				
	KP. HIU 11	136	112	57.65	0	0	30	35.06	0.45	0.64	40	0	0	60	0	0	40	15	0	0	0	30	0	0	30	0	0	40	5	95.06				

Capaian pada IKU indek kinerja operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dengan capaian pada Triwulan III tahun 2023 sebesar 97,53 atau dengan capaian sebesar 111,34%. Capaian IKU ini telah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 87,6. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama, karena IKU ini dihitung berdasarkan semesteran yaitu pada triwulan II dan IV. IKU ini juga tidak dapat dibandingkan dengan 5 tahun terakhir.

Tercapainya IKU ini dikarenakan realisasi hari operasi yang mencapai dari target hari operasi dan jumlah kapal yang diperiksa dan unsur lain yang menjadi komponen perhitungan indeks operasi kapal pengawas. Untuk mendukung IKU ini telah telah dialokasikan dana sebesar Rp. 18.605.510.000 dengan realisasi sampai bulan September 2023 sebesar Rp. 17.331.780.458 atau dengan persentase sebesar 93,15%. Keberhasilan capaian IKU ini dikarenakan kondisi kapal pengawas (Hiu Macan 01 dan Hiu 11) pada Triwulan III tahun 2023 dengan kondisi yang siap untuk beroperasi sedangkan faktor cuaca juga sudah mengalami kondisi yang baik, kondisi cuaca buruk hanya terjadi pada awal tahun yaitu bulan Januari sehingga bulan Februari sehingga bulan yang lain dapatdi optimalkan gelar operasi kapal pengawas. Hal ini juga sejalan dengan kegiatan perawatan yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Pontianak dimana armada kapal pengawas kelautan dan perikanan sudah dilakukan perawatan. Jumlah dan kondisi kesiapan AKP (awak kapal pengawas) juga menjadi penentu keberhasilan capaian IKU ini, AKP yang melakukan gelar operasi dan yang ditempatkan dikapal pengawas sudah memiliki kecakapan pengawakapan kapal yang cukup mumpuni. Pada tahun akhir tahun 2022 lalu AKP Stasiun PSDKP

Pontianak Juga melakukan *Medical Check-Up* untuk pemantapan kondisi kesehatan AKP selama bertugas selama tahun 2023.

Tabel 6. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Operasi Kapal Pengawas

INDIKATOR KINERJA	TW III 2020		TW III 2021		TW III 2022		TW III 2023		TW III 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Operasi Kapal Pengawas	-	-	-	-	-	-	87,6	97,53	87,6	97,53
% Capaian	-		-		-		111,34		111,34	

2. IKU Indek kinerja Speed Boat Pengawas

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Kinerja Operasi Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan yakni; 1). Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan; 2). Cakupan wilayah pengawasan; 3). Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; 4). Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi. Formula perhitungan:

$$i_{sp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot} (\%) \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

i_{sp} = Indeks kinerja Speedboat Pengawas

Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi

Capaian = Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas

Target = Sasaran kinerja Speedboat Pengawas

VARIABEL PEMBENTUK

Daftar Faktor Penghitung Indeks Kinerja Speedboat Pengawas:

1. Jumlah Pemeriksaan [Bobot 40%] yang terdiri dari:
 - Pemeriksaan Kapal (unit kapal): Bobot 50%
 - Pemeriksaan Kelautan (kali): Bobot 50%
 - Setiap Speedboat Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 unit kapal ikan per hari.
2. Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan [Bobot 40%];
 - Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015)
 - Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis speedboat pengawas.
3. Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi [Bobot 15%] yang terdiri dari:
 - Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan: Bobot 60%
 - Dukungan kegiatan SAR: Bobot 40%
 - Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.
4. Jumlah dukungan operasi lainnya [Bobot 5%] yang terdiri dari:
 - Penyitaan Alat Tangkap Terlarang Bobot: Bobot 40%
 - Pemutusan Rumpon Illegal: 40%
 - Dukungan Operasi Bersama: Bobot 20%
 - Komponen bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Hasil pengukuran indeks kinerja operasi Speedboat pengawas Triwulan III tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 7. Perhitungan Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan III Tahun 2023

Nama Speedboat	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)			Pemeriksaan Kelautan (50%)			Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)			Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)			Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)			Dukungan Kegiatan SAR (40%)			Tidak Lanjut Target Operasi (15%)			Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)			Pemutusan Rumpon legal (40%)			Dukungan Operasi Bersama (20%)			Dukungan Operasi Lainnya (5%)			Total Nilai Indeks	Nilai per Saliner
	TW III			TW III			TW III			TW III			TW III			TW III			TW III			TW III			TW III										
	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai					
Napoleon 03	27	47	50	0	0	50	40	0,00018	0,000182525	40,00	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	100				
Napoleon 37	13	20	50	0	0	50	40	0,00018	0,000200279	40,00	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	100				
Napoleon 38	10	21	50	0	0	50	40	0,00018	9,08038E-05	20,20	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	80,20				
RIB/Sea Rider 05	12	18	50	0	0	50	40	0,00018	0,000145149	32,26	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	92,26				
Speed Boat TB.01	21	23	50	0	0	50	40	0,00018	0,000185366	40,00	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	100				

Capaian pada IKU indek kinerja operasi Speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dengan capaian pada Triwulan III tahun 2023 sebesar 94,49 atau dengan capaian 107,87% dengan rincian pada tabel diatas. Capaian IKU ini telah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 87,6. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama, karena IKU ini dihitung berdasarkan semesteran yaitu pada triwulan II dan IV dan merupakan IKU baru pada tahun 2022 perhitungan triwulan II dan IV. Tercapainya IKU ini dikarenakan realisasi hari operasi yang telah mencapai dari target hari operasi. Keberhasilan dikarenakan kegiatan gelar operasi dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dengan pemilihan rute operasi yang tepat. Selain itu juga kapal yang diperiksa dapat mencapai target karena kapal yang diperiksa masih dapat dijangkau oleh armada Speedboat pengawas. Kondisi Speedboat juga siap untuk melakukan gelar operasi dengan kondisi yang baik. Kegiatan perawatan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang telah dilakukan sepanjang tahun 2022 sehingga menjamin kesiapan dalam kesiapan operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat pada awal tahun 2023. Penyebaran operator Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat yang merata di tiap Satwas/Wilker menjadikan kegiatan gelar operasi menjadi lebih siap dan menggunakan tenaga operator Speed Boat yang berkompeten dibidangnya. Untuk mendukung IKU ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 1.030.775.000 dengan realisasi sampai bulan September sebesar Rp. 468.203.400 atau dengan persentase sebesar 45,42%.

Tabel 8. Perbandingan Target dan Capaian Indek operasi Speed Boat Pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.

INDIKATOR KINERJA	TW III 2020		TW III 2021		TW III 2022		TW I 2023		TW I 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks kinerja Speed Boat Pengawas	-	-	-	-	-	-	87,6	94,49	87,6	94,49
% Capaian	-		-		-		107,87		107,87	

3. IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Pengawas Perikanan dan/atau Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan” diidentifikasi kedalam IKU yaitu: “Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak” dan Ukuran keberhasilan indikator kinerja tersebut diperoleh dari agregasi 4 (empat) Sub IKU Pengawasan SDK yaitu: (1) Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPR); (2) Jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak; (3) Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak; (4) Pelaku Usaha Yang Diawasi Dari Kegiatan Destructive Fishing Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Pada Tahun 2023 ditargetkan presentase sebesar 100% dan untuk Triwulan III ditargetkan sebesar 100%. Untuk capaian pada Triwulan III sebesar 100% dengan persentase sebesar 100%. Capaian ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun lalu mengalami nilai yang sama dimana pada periode Triwulan III Tahun 2022 capaian sebesar 100% dan lebih tinggi dari Triwulan III tahun 2021 sebesar 75%. Indikator tersebut merupakan indikator kinerja yang sama dengan tahun 2021 dan tahun 2022 yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020 atau 5 tahun

terakhir. Pada tahun 2020 target capaian dalam bentuk jumlah pelaku usaha sedangkan tahun 2021 dan 2022 target capaian dalam bentuk persentase.

Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan diperoleh dari perhitungan 4 komponen pembentuk sebagai berikut:

$$X_k = (x_{pkprl} + x_{jikan} + x_{cemar} + x_{df}) / n$$

x_k : Persentase pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan

x_{pkprl} : Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut;

x_{jikan} : Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan jenis ikan dilindungi

x_{cemar} : Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

x_{df} : Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan destructive fishing

n : Jumlah komponen kepatuhan di UPT

Sehingga dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

$$X_k = (100+100+100+100) / 4$$

$$X_k = 100\%$$

Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Triwulan III tahun 2023 adalah 100% yang terbentuk dari:

a. Pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan jenis ikan dilindungi

Rekapitulasi pelaku usaha yang diawasi dari pemanfaatan jenis ikan dilindungi pada Triwulan III tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 9. Pelaku Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pelaku Usaha	Alamat	Detail kegiatan Usaha	Dokumen Perizinan	Hasil Pengawasan	Ket
1	31 Januari 2023	Robi Septiadi	Komplek. Pondok Indah Lestari, Blok D1, No.17 RT 004/ RW 011, Desa Parit Baru, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya	Hiu dan Pari Look a like species	1270000101308	Telah melakukan pengiriman / distribusi produk olahan berupa kulit hiu dan pari look a like tanpa disertai surat rekomendasi dari BPSPL Pontianak dan kepadanya telah diberikan surat teguran tertulis.	Tidak Patuh
2	15 Februari 2023	'Rudi Hartono / PT. Global Asia redwana	Jl. Dr Wahidin Komp. Sepakat Asri No. C6, Kota Pontianak	Penangkaran ikan arwana	2012210034087	Tidak dapat melakukan kegiatan usahanya dari PT. Global Asia Redwana / NIB.	Patuh

						2012210034087 karena mengalami kendala pengurusan dokumen perizinan di pemerintah pusat dan aliran dana asing pun telah dihentikan, sehingga kegiatan usaha dilakukan menggunakan PT. Global Alam Redwana yang berstatus PMDN dengan NIB. 0220104140775	
3	10-12 Maret 2023	Albert Argiato Efendiy	Jl. Samudin Kel. Kuala Pembuang Kec. Seruyan Hilir, Kab. Seruyan	Hiu /Pari	-	Pelaku dalam pemanfaatan jenis ikan dilindungi tidak dilengkapi dengan dokumen SIPJI	Tidak Patuh
4	10 Mei 2023	'PD. Fathi Nusantara	Jl. Raya Sungai Kakap, Dusun Nirwana, Kab. Kubu Raya	Hiu dan Pari Appendiks Cites	0220107832 283	Pelaku usaha melakukan pengiriman / distribusi produk olahan berupa kulit hiu dan pari Appendiks Cites II dengan disertai SIPJI dan SAJI dari BPSPL Pontianak	Patuh
5		'Bpk. Stephanus			8120003951 502		Patuh
6		'Bpk. Agus Vedi			0214000961 213		Patuh
7	16 Mei 2023	PT. Nusantara Arwana Indonesia	Dusun. Tj. Kuda, Desa. Padua Mendalam, Kec.Putussibau Utara, Kab.Kapuas Hulu, Kalimantan Barat	Penangkaran ikan arwana	0220005272 366	semua dokumen lengkap dan sesuai dengan kondisi di lapangan	Patuh
8	23 Mei 2023	CV. Lucky Indo Aquatic	Jl. Putussibau Bika HM 231, Desa Jaras Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat	Penangkaran ikan arwana	8120004872 5160007	semua dokumen lengkap dan sesuai dengan kondisi di lapangan	Patuh

Sampai dengan Triwulan III tahun 2023 pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan jenis ikan dilindungi berjumlah sebanyak 8 pelaku usaha. Pelaku usaha melaksanakan usaha dibidang pengimanan jenis ikan dilindungi di Wilker PSDKP Ketapang kemudian dari hasil pemeriksaan tidak dilengkapi dengan dokumen resmi kemudian pelaku diberi teguran tertulis. Pelaku usaha Penangkaran jenis ikan dilindungi berupa ikan arwana di jalan DR. Wahidin Kota Pontianak dan Kapuas Hulu dimana proses pemanfatan telah taat kemudian pelaku usaha di Kecamatan Seruyan Hilir, Kab. Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan kegiatan usaha berupa pemanfatan penangkapan jenis ikan dilindungi berupa Hiu dan Pari dimana tidak dilengkapi dengan dokumen

SIPJI sehingga diberikan sanksi berupa surat teguran tertulis dan telah dilakukan pengawasan Hiu dan Pari Appendiks Cites di Sungai Kakap kabupaten Kubu Raya dimana hasil pemeriksaan pelaku usaha telah taat.

b. Pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan destructive fishing

Rekapitulasi pelaku usaha yang diawasi dari kegiatan destructive fishing pada Triwulan III Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Pelaku usaha yang diawasi kegiatan destructive fishing

NO	PELAKU USAHA	JENIS KEGIATAN	LOKASI	HASIL PENGAWASAN
1	Ridwansyah	Nelayan Kapal < 10 GT	PPI. Kumai	Tidak ada dugaan pelanggaran
2	Abdul Hakim	Nelayan Kapal < 10 GT	PPI. Kumai	Tidak ada dugaan pelanggaran
3	Supiansyah	Nelayan Kapal < 10 GT	PPI. Kumai	Tidak ada dugaan pelanggaran
4	Agus Rahman	Nelayan Kapal < 10 GT	PPI. Kumai	Tidak ada dugaan pelanggaran
5	Aly Usman	Nelayan Kapal < 10 GT	PPI. Kumai	Tidak ada dugaan pelanggaran
6	Junaidi	Nelayan Kapal < 10 GT	PPI. Kumai	Tidak ada dugaan pelanggaran
7	Abdul Syukur	Nelayan Kapal < 10 GT	PPI. Kumai	Tidak ada dugaan pelanggaran
8	Nurkholis	Nelayan Kapal < 10 GT	PPI. Kumai	Tidak ada dugaan pelanggaran
9	Maskur	Nelayan Kapal < 10 GT	PPI. Kumai	Tidak ada dugaan pelanggaran
10	Mastuan	Nelayan Kapal < 10 GT	PPI. Kumai	Tidak ada dugaan pelanggaran
11	Nordin	Nelayan Kapal < 10 GT	PPI. Kumai	Tidak ada dugaan pelanggaran
12	Said M. Yusuf	Nelayan Kapal < 10 GT	PPI. Kumai	Tidak ada dugaan pelanggaran
13	Abdul Rahman	Nelayan Kapal < 10 GT	PPI. Kumai	Tidak ada dugaan pelanggaran
14	M. Yusuf Mastur	Nelayan Kapal < 10 GT	PPI. Kumai	Tidak ada dugaan pelanggaran
15	Musyadi Yusuf	Nelayan Kapal < 10 GT	PPI. Kumai	Tidak ada dugaan pelanggaran
16	Muhli	Nelayan Kapal < 10 GT	PPI. Kumai	Tidak ada dugaan pelanggaran
17	Cecep Wishnu. K	Nelayan Kapal < 10 GT	PPI. Kumai	Tidak ada dugaan pelanggaran
18	Muslimin	Nelayan Kapal < 10 GT	PPP.Teluk Batang	Tidak ada dugaan pelanggaran
19	Hendra	Nelayan Kapal < 10 GT	PPP.Teluk Batang	Tidak ada dugaan pelanggaran
20	Saharudin	Nelayan Kapal < 10 GT	PPP.Teluk Batang	Tidak ada dugaan pelanggaran
21	Sukardi	Nelayan Kapal < 10 GT	PPP.Teluk Batang	Tidak ada dugaan pelanggaran
22	Yunus	Nelayan Kapal < 10 GT	PPP.Teluk Batang	Tidak ada dugaan pelanggaran

NO	PELAKU USAHA	JENIS KEGIATAN	LOKASI	HASIL PENGAWASAN
23	Rahmanto	Nelayan Kapal < 10 GT	PPP.Teluk Batang	Tidak ada dugaan pelanggaran
24	Suparto	Nelayan Kapal < 10 GT	PPP.Teluk Batang	Tidak ada dugaan pelanggaran
25	Pendi	Nelayan Kapal < 10 GT	PPP.Teluk Batang	Tidak ada dugaan pelanggaran
26	Jap	Nelayan Kapal < 10 GT	PPP. Teluk Batang	Tidak ada dugaan pelanggaran
27	Mat Lahir	Nelayan Kapal < 10 GT	PPP. Teluk Batang	Tidak ada dugaan pelanggaran
28	Hermanto	Nelayan Kapal < 10 GT	PPP. Teluk Batang	Tidak ada dugaan pelanggaran
29	Long ti	Nelayan Kapal < 10 GT	PPP. Teluk Batang	Tidak ada dugaan pelanggaran
30	Murat	Nelayan Kapal < 10 GT	PPP. Teluk Batang	Tidak ada dugaan pelanggaran
31	Mis	Nelayan Kapal < 10 GT	PPP. Teluk Batang	Tidak ada dugaan pelanggaran
32	Muslimin	Nelayan Kapal < 10 GT	PPP. Teluk Batang	Tidak ada dugaan pelanggaran
33	Wadi	Nelayan Kapal < 10 GT	PPP. Teluk Batang	Tidak ada dugaan pelanggaran

Sampai triwulan III pengawasan destructive fishing telah dilakukan sebanyak 33 pelaku usaha terhadap nelayan dengan kapal <10 GT. Dari 33 kapal tersebut dilakukan di PPP Teluk Batang oleh Satwas Kayong Utara dan PPI Kumai oleh Satwas PSDKP Kotawaringin Barat. Dari hasil pemeriksaan terhadap 33 kapal yang diperiksa tidak ditemukan indikasi melakukan kegiatan destructive fishing dan tidak adanya dugaan pelanggaran.

c. Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan nya Dalam Pengelolaan Limbah yang Berdampak pada Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya

Perairan darat dan laut adalah ekosistem akuatik yang memiliki peran penting dalam siklus hidrologi. Selain dipengaruhi oleh aktivitas organisme atau lingkungan, kualitas suatu perairan juga ditentukan oleh aktivitas manusia. Perubahan pola pemanfaatan lahan menjadi area pemukiman, pertanian, serta meningkatnya aktivitas industri akan memberikan dampak terhadap kualitas perairan. Perairan menjadi ekosistem yang rentan tercemar akibat limbah yang dihasilkan dari beragam pola pemanfaatan lahan dan aktivitas industri. Mengingat peran penting perairan bagi keberlangsungan hidup organisme, termasuk berbagai jenis ikan, maka pemantauan perairan yang terindikasi

tercemar sangat perlu dilakukan secara berkelanjutan, komprehensif, dan menggunakan metode yang tepat agar dapat segera ditangani.

Sampai Triwulan III Pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya sebanyak 8 pelaku usaha yang telah dilakukan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sebagaimana rincian tabel berikut berikut;

Tabel 11. Pengawasan Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya (Pencemaran) sampai bulan September 2023

No	Pelaku Usaha	Alamat	Waktu Pengawasan	Hasil Pengawasan
1	PT. Energi Unggul Persada	Jalan Raya Sungai Limau, Ds. Sungai Limau, Kec. Sungai Kunyit, Kab. Mempawah, KALBAR	13-01-2023	Dari hasil pengamatan pada Outlet WWTP, Outlet SWRO, Outfall gabungan, tidak ditemukan biota/ikan yang terdampak / tidak ada indikasi terjadinya pencemaran dari kegiatan Industri Pengolahan Kelapa Sawit
2	PT. Agri Sentral Lestari	Kecamatan Tayan Hilir, Kabupten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat	3-05-2023	Pengawas Perikanan masih menunggu hasil uji Lab. Dari LHK Prov. Kalimantan Barat, untuk menyimpulkan poin-poin dalam pengawasan
3	Kampung Budidaya 'Maju Bersama'	Gg. Bandaria No. 11C. kelurahan tengah Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah, Prov. Kal-Bar	14 -06-2023	Telah memiliki izin usaha Untuk dokumen kepedulian lingkungan telah disosialisasikan dan kepada pelaku usaha untuk segera diurus
4	PT. Multi Artha Samudra	Jl. A Rani Kuala Secapah, Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah Provinsi Kal-bar	15-06- 2023	Telah memiliki izin usaha Untuk dokumen kepedulian lingkungan telah dalam proses pengajuan ke dinas lingkungan hidup
5	PT. Agri Inti Prima	Jl. A. Yani, Kel. Pasir Wan Salim Kec. Mempawah Hilir, Kab . Mempawah	15-06- 2023	Telah memiliki izin usaha Untuk dokumen kepedulian lingkungan telah dalam proses pengajuan ke dinas lingkungan hidup dikarenakan lahan tambak yang mereka Kelola tidak beroperasi selama 1 tahun
6	Bong Fai Tjong	Jl. Raya Sui . Bakau, Desa Sui. Pinyuh, Kec. Sui. Pinyuh, Kab. Mempawah	15 -06-2023	Telah memiliki izin usaha Untuk dokumen kepedulian lingkungan telah dimiliki dalam bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

				(SPPL)
7	PT. Pulaumas Khatulistiwa	Jl.Khatulistiwa KM. 6 No. 602, Kelurahan Batulayang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak Kal Bar	12 -06-2023	Limbah yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pengolahan ikan yang dilakukan oleh PT. Pulaumas Khatulistiwa Dan CV. Dolphin telah diolah dengan baik menggunakan IPAL yang telah terstandarisasi oleh KLHK.
8	CV. Dolphin		12 -06-2023	

d. Pemeriksaan kepatuhan usaha wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut

Pada Triwulan III tahun 2023 Pemeriksaan kepatuhan usaha wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut sebanyak 5 pelaku usaha. Dimana pelaku usaha tersebut dapat dijelaskan pada tabel;

Tabel 12. Pengawasan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut

No	Pelaku Usaha	Alamat	Waktu Pengawasan	Hasil Pengawasan
1	PT. Energi Unggul Persada	Jalan Raya Sungai Limau, Ds. Sungai Limau, Kec. Sungai Kunyit, Kab. Mempawah, KALBAR	13-14 Januari 2023	Berdasarkan hasil pengambilan foto udara dan analisis tumpang susun dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat kawasan pipa penyalur minyak sawit pada PT. EUP tidak masuk kedalam zona konservasi Pulau Temaju dan akan diurus PKKPR
2	PT. Randayan Hartadika Abadi	Pulau Randayan, Kalimantan Barat pada titik koordinat 0° 42' 50" N; 108° 43' 44" E	13 - 17 Maret 2023	Randayan island resort memiliki bangunan yang memanfaatkan ruang laut berupa 2 buah dermaga yang difungsikan sebagai tempat sandar kapal yang digunakan untuk mengantarkan tamu/wisatawan, selain itu juga terdapat breakwater yang masuk kedalam lokasi pemanfaatan ruang laut. • Potensi pemanfaatan ruang laut yang digunakan oleh Randayan Island Resort tersebut sebesar 0.92 Ha yang memuat bangunan laut berupa 2 buah dermaga dan breakwater. Luasan tersebut terbentuk dari titik-titik yang saling menghubungkan sebagai berikut: 1.Dermaga 1. 0,12 Ha Dermaga 2 .0,54 Ha 2.Breakwater 0,26 Ha Jumlah 0.92 Ha
3	PT. Sinar Sakti Sahabat Sejati Jaya	Pulau Penata besar, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang,	13 - 17 Maret 2023	Segara mengajukan permohonan izin PKKPR dan POLSUS PWP3K Bersama BPSPL telah melakukan pengukuran luasan serta letak koordinat yang dimanfaatkan untuk diajukan di dalam permohonan dengan menggunakan drown sesuai kondisi di lapangan;

		Kalimantan Barat pada titik koordinat 0° 45' 29" N; 108° 46' 16" E		<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan yang dilakukan oleh PT. Sinar Sakti Sahabat Sejati Jaya di Pulau Penata Besar meliputi bangunan laut berupa Rumah Jaga yang difungsikan sebagai sarana tambat labuh kapal untuk operasional kegiatan budidaya, serta long line sebagai media budidaya Kerang Mutiara dan rakit apung sebagai sarana penunjang. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi menggunakan pengambilan foto udara dan tagging lokasi pemanfaatan melalui tracking longline dengan nilai buffer antara titik terluar longline sebesar 10 Meter. • Luasan Pemanfaatan Ruang Laut berdasarkan hasil identifikasi adalah sebagai berikut: 1 Rumah Jaga 0,01 Ha 2 Longline 22,89 Ha Jumlah 22,90 Ha
4	CV. Borneo Mutiara	Perairan Laut Natuna, Pulau Lemukutan, Kalimantan Barat pada titik koordinat 0° 46' 21" N; 108° 42' 50" E	13 - 17 Maret 2023	<p>"CV. Borneo Mutiara memiliki indikasi kepatuhan dengan langkah yang sesuai dengan sosialisasi yang telah diterimanya dari BPSPL Pontianak yaitu segera mengajukan permohonan izin PKKPRL pada tanggal 6 Mei 2023 dan POLSUS PWP3K telah mengecek kesesuaian luasan serta letak koordinat yang diajukan di dalam permohonan dengan kondisi di lapangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • CV. Borneo Mutiara beralamat kantor di Sukomanunggal Indah 2-A, Kel.Sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang dipimpin oleh Wanto Sukendy. CV. Borneo Mutiara melakukan kegiatan budidaya Kerang Mutiara menggunakan metode longline sebanyak 22 unit dengan fasilitas penunjang berupa Dermaga dengan ukuran 25 x 1,2 m sebanyak 1 buah, Rakit Kerja sebanyak 2 unit dengan ukuran 4m x 8m, keramba jaring apung sebanyak 2 unit, serta bangunan kerja sebanyak 1 unit. • Luasan Pemanfaatan Ruang Laut berdasarkan hasil identifikasi adalah sebagai berikut: No Jenis Pemanfaatan Luasan (Ha) 1. Longline 23,10 2. Keramba Jaring Apung 0,04 3. Rumah Kerja 0,11 4. Jetty 0,001 Jumlah 23,25"
5	PT. Bima Budidaya Mutiara	Perairan Laut Natuna, Pulau Lemukutan, Kalimantan Barat pada titik koordinat 0° 44'	17 Maret 2023	PT. Bima Budidaya Mutiara di Lemukutan hingga saat ini hanya melakukan kegiatan usaha pembesaran tiram mutiara dengan penyuntikan nucleus sebagai bahan terbentuknya mutiara di dalam tubuh tiram dengan

		1" N; 108° 43' 47.2" E		<p>Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR) No. 10022310516100002 dan telah dilakukan pengecekan kesesuaian antara izin tertulis dan kondisi lapangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas = 5,31 Ha 2. Koordinat pemanfaatan ruang Laut telah sesuai dengan yang tertuang di dalam peta PKKPR;
6	KKPR Rumah Makan Pantai Indah Kakap.	<p>Dusun Nirwana RT/RW 04/001 Desa Sungai Kakap, Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat</p>	30 Mei 2023	<p>Perizinan dimiliki oleh berupa izin usaha, izin lingkungan, Izin Lokasi (darat) dan sertifikat laik fungsi dengan Nomor Induk Berusaha yaitu 9120003940174</p> <p>Pelaku usaha belum menginput permohonan perizinan KKPR pada OSS</p>
7	Rumah Makan Teratai Indah	<p>Jl. Raya Sungai Kakap, RT/RW 03/01, Kel Sungai Kakap, Kec. Sungai kakap, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.</p>	30 Mei 2023	<p>Berdasarkan koordinat yang dimohonkan didapatkan luasan kawasan sebesar 0.046425 Ha dengan potensi PNBP yang didapatkan sebesar Rp. 867.223, -</p> <p>Pelaku usaha belum menginput permohonan perizinan KKPR ke dalam OSS</p>
8	Tangkahan Susanti/Ameng	<p>di Jalan Benteng Laut RT/RW 001/001 Desa Sungai Kakap, Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya, Provinsi Kal-Bar</p>	30 Mei 2023	<p>Luasan kawasan sebesar 0.017082 Ha dengan potensi PNBP yang didapatkan sebesar Rp. 319.088, -</p> <p>Pelaku usaha menempati lokasi tersebut dengan status sewa dan dalam waktu dekat akan berpindah lokasi dengan status sewa kembali.</p>
9	Tangkahan Stephanus	<p>Jalan Benteng Laut RT/RW 001/001 Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.</p>	30 Mei 2023	<p>Perizinan berupa izin operasional berusaha dan izin lingkungan dari Tangkahan</p> <p>Stephanus pada proses wawancara didapatkan telah memiliki izin operasional</p> <p>berusaha dengan Nomor Izin Berusaha 8120003951502 dan izin lingkungan berupa Surat Pernyataan Persetujuan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya Nomor 660.1/11/303/2020 tanggal 5 November 2020.</p> <p>Pelaku usaha telah menginput permohonan KKPR nya namun belum berhasil mendapatkan dokumen</p>

				persetujuan.
10	Tangkahan Kinanto	Jl. Karya Jaya Dusun Nirwana, Kel. Sungai Kakap, Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.	30 Mei 2023	Telah memiliki izin dengan Nomor Izin Berusaha 8120016240258 dan izin lingkungan berupa Surat Pernyataan Persetujuan Lingkungan Camat Sungai Kakap Nomor 640/04/EkBang tanggal 30 April 2015. Pelaku usaha telah menginput permohonan KKPRL nya namun belum berhasil mendapatkan dokumen persetujuan.
11	PT. Borneo Alumindo Prima	Desa Pagar Mentimun , Kec. Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat	20/9/2023	PT. Borneo Alumindo Prima melakukan kegiatan reklamasi dalam pembangunan Tersus. PT. Borneo Alumindo Prima sedang melakukan pengurusan Surat Izin Kegiatan Reklamasi dan Surat Izin Kegiatan Keruk

Untuk mencapai indikator kinerja ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 286.152.000 dan sampai dengan 31 September 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 103.981.800 atau sebesar 36,34%. Indikator kinerja ini telah tercapai dikarenakan pemeriksaan jumlah pelaku usaha dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan karena lokasi pengawasan yang berdekatan. Tercapainya target tidak terlepas dari SDM pengawas perikanan dan Polsus PWP3K yang berada di Stasiun PSDKP Pontianak dan tersebar di tiap Satwas/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Keberhasilan pencapaian target yang baik dikarenakan pada awal tahun 2023 dilakukan pertemuan koordinasi Satwat/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dalam percepatan pelaksanaan kegiatan pengawasan. Kemudian setelah 3 bulan yaitu akhir bulan Maret, Juni dan September dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan pengawasan lewat daring dan luring lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dikoordinir oleh pelaksana koordinasi OPPP Stasiun PSDKP Pontianak. Jadi Sasaran Strategis dan Indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil dikarenakan telah mencapai target yang telah ditentukan.

Tabel 13. Perbandingan Target dan Capaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan III tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA	TW III 2020		TW III 2021		TW III 2022		TW III 2023		TW III 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase/jumlah penyelesaian pemeriksaan Pelaku Usaha kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	95%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
% Capaian	-		105,26		105,26		100		100	

4. IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan” diidentifikasi kedalam indikator kinerja yaitu “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak” Ukuran keberhasilan IKU tersebut diperoleh dari persentase jumlah capaian pengawasan lainnya pelaku usaha bidang perikanan yang terdiri dari agresi 3 (tiga) Sub IKU Pengawasan SDP yaitu: ⁽¹⁾ Kepatuhan Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan; ⁽²⁾ Kepatuhan Unit Usaha Budidaya Ikan terhadap Peraturan Perundang-Undangan; ⁽³⁾ Kepatuhan Unit Usaha penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dengan hasil capaian 100%.

Pada Triwulan III tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya, capaian pada Triwulan III ini tercapai sesuai dengan yang ditargetkan yaitu tercapai sebesar 100% unit pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya atau dengan persentase capaian 100%. Indikator tersebut apabila dibandingkan dengan periode tahun 2022 pada periode Triwulan III yaitu sama dengan capaian 100%. Capai IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir karena IKU ini dimulai pada tahun 2020 yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Capaian indikator kinerja “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak”, diperoleh dari hasil pengukuran agresi 3 (tiga) Sub-IKU, sebagaimana dijelaskan diatas. Untuk Pembahasan capaian kinerja masing-masing sub IKU yang berkontribusi pada pencapaian kinerja Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak, sebagai berikut:

a) Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Sektor Perikanan Berbasis Resiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Pengawasan sektor perikanan yang berbasis resiko dengan mengacu pada Perdirjen PSDKP nomor 6 tahun 2021 baik itu objek yang diawasi pada sektor kapal perikanan dilakukan terhadap kapal-kapal perikanan yang berpangkalan pada pelabuhan perikanan atau Tangkahan (Pelabuhan Pribadi) dimana Satwas/Wilker PSDKP berada di Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Pengawasan kapal perikanan dilakukan dengan instrumen HPK, baik HPK keberangkatan maupun kedatangan serta penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) bagi kapal perikanan, NIB (Nomor Induk Berusaha). Pengawasan Terhadap Unit Usaha Pengelohan dan Pemasaran Ikan dengan instrumen NIB (Nomor Induk Berusaha) dimana Satwas/Wilker PSDKP berada di Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Pengawasan Terhadap Usaha Budidaya Ikan dengan instrumen NIB (Nomor Induk Berusaha) dimana Satwas/Wilker PSDKP berada di Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Penilaian penyelesaian tahapan pemeriksaan pada pengawasan kegiatan budidaya ikan sebagaimana tabel berikut;

Tabel 14. Tahapan pemeriksaan unit usaha pembudidayaan ikan

NO	TAHAPAN PEMERIKSAAN	NILAI	OUTPUT
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	- Surat Pemberitahuan - SPT - Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	- Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran 1) - Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Selain itu juga dilakukan kegiatan pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dilakukan terhadap UPI skala besar dan skala kecil. Pengawasan UPI skala besar dilakukan dengan memeriksa dokumen Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP), Surat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha yang memasarkan produknya baik didalam negeri maupun luar negeri, dan Sertifikat *Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP)* serta Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate (HC)* bagi usaha yang mengekspor produk perikanan. Sedangkan pengawasan UPI skala kecil (Usaha Mikro Kecil dan Kelompok Pengolah Pemasar) dilakukan dengan memeriksa

dokumen perizinan yaitu Tanda Daftar Perusahaan/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDP/TDUP) atau PIRT, serta pengujian terhadap produk perikanan untuk mengetahui adanya Bahan Tambah Berbahaya (BTB). Untuk Pencapaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak, maka harus memenuhi persyaratan seperti tabel Berikut;

Tabel 15. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor pengolahan dan pemasaran ikan, sebagaimana tabel di bawah:

NO	TAHAPAN PEMERIKSAAN	NILAI	OUTPUT
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	- Surat Pemberitahuan - SPT - Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	- Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran 1) - Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Sampai dengan bulan September 2023 pengawasan sektor perikanan berbasis resiko telah dilaksanakan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Rekapitulasi kegiatan pengawasan sampai dengan bulan September 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 16. Rekapitulasi pengawasan sektor perikanan berbasis resiko sampai dengan bulan September 2023

No	Tanggal Pemeriksaan	Nama Pelaku Usaha	Alamaat	Status Penanaman Modal	KBLI	Subsektor Pengawasan	Rekomendasi
1	9-2-2023	PT. Enviro Aquafarm Sukses	Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat	PMDN	03254	Pembudidayaan Ikan	Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan;
2	14-2-2023	PT. Global Asia Redwana	Jl. Pondok Indah Lestari Komp. Permata No.02, Kubu Raya	PMA	6206	Pengolahan dan Pemasaran Ikan	Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan;
3			Jl. Pondok Indah Lestari Komp. Permata No.02, Kubu Raya	PMA	10213	Pengolahan dan Pemasaran Ikan	
4			Jl. Pondok Indah Lestari Komp. Permata No.02, Kubu Raya	PMA	10293	Pengolahan dan Pemasaran Ikan	
5			Jalan Dr. Wahidin Komplek Sepakat Asri Nomor C6 Desa/Kelurahan Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak	PMA	46206	Pengolahan dan Pemasaran Ikan	

6	16-3-2023	CV. Irza Li Fardha	Jalan Tebu Gg. Teguh Karya No.16 Desa Kelurahan Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat	PMDN	03131	Pengolahan dan Pemasaran Ikan	Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan
7	16-3-2023	CV. Irza Li Fardha	Jalan Tebu Gg. Teguh Karya No.16 Desa Kelurahan Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat	PMDN	03241	Pembudidayaan Ikan	Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan
8	18-3-2023	PT. Bima Budidaya Mutiara	Pulau Lemukutan, Kab. Bengkayang	PMDN	03215	Pembudidayaan Ikan	Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan
9	19-3-2023	CV. Borneo Mutiara	Pulau Lemukutan, Kab. Bengkayang	PMDN	03215	Pembudidayaan Ikan	Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan
10	16-3-2023	PT. Global Vannamei Sejahtera	Desa Kuala Secapah. Kec. Mempawah hilir. Kab. Mempawah	PMDN	03254	Pembudidayaan Ikan	Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan
11	16-3-2023	PT. Multi Artha Samudra	Kec. Mempawah Hilir. Kab. Mempawah	PMDN	03254	Pembudidayaan Ikan	Penerapan Sanksi Penggunaan Bahan obat ikan tidak terdaftar di KKP
12	5-5-2023	PT. Xinhaiyuan Indonesia Fishery	UPPP. JI. TPI Sungai Rengas, Blok Kawasan Industri, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kal-Bar	PMA	10213	Pengolahan dan Pemasaran Ikan	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha;
13	5-5-2023	PT. Xinhaiyuan Indonesia Fishery	UPPP. JI. TPI Sungai Rengas, Blok Kawasan Industri, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kal-Bar	PMA	10293	Pengolahan dan Pemasaran Ikan	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha;
14	5-5-2023	PT. Xinhaiyuan Indonesia Fishery	UPPP. JI. TPI Sungai Rengas, Blok Kawasan Industri, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kal-Bar	PMA	46206	Pengolahan dan Pemasaran Ikan	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
15	5-5-2023	Fu Djim Song als Sunardi	Jl. Imam Bonjol Gg. Hidayat No. 100, Desa/Kelurahan Benuamelayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak	PMDN	47215	Pengolahan dan Pemasaran Ikan	Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan;
16	8/5/2023	PT. Delta Golden Jaya International	Jl. Imam Bonjol Gang Haji Salmah Nomor 2A, Desa/Kelurahan Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara	PMA	46206	Pengolahan dan Pemasaran Ikan	Perbaikan
17	8/5/2023	PT. Delta Golden Jaya International	Jl. Imam Bonjol Gang Haji Salmah Nomor 2A, Desa/Kelurahan Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara	PMA	46324	Pengolahan dan Pemasaran Ikan	Perbaikan
18	10/5/2023	U. Santri Wijaya	Jalan Pahlawan No.2, Kelurahan Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat	PMDN	03111	Penangkapan dan Pengangkutan Ikan	Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan;
19	11/5/2023	NG Syaw Cung	Jalan Dwi Warna No. 45, Kel. Melayu, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kal-Bar	PMDN	03111	Penangkapan dan Pengangkutan Ikan	Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan;
20	11/5/2023	NG Syaw Cung	Jalan Dwi Warna No. 45, Kel.	PMDN	03113	Penangkapan dan Pengangkutan	Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi

			Melayu, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kal-Bar			Ikan	penyelesaian permasalahan perusahaan;
21	11/5/2023	NG Syaw Cung	Jalan Dwi Warna No. 45, Kel. Melayu, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kal-Bar	PMDN	03113	Penangkapan dan Pengangkutan Ikan	Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan;
22	10/5/2023	PT. Sumber Laut Borneo Equator	Jalan Penjajab Barat, Pemangkat, desa/Kelurahan Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat	PMDN	50133	Penangkapan dan Pengangkutan Ikan	Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan;
23	10/5/2023	PT. Sumber Laut Borneo Equator	Jalan Penjajab Barat, Pemangkat, desa/Kelurahan Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat	PMDN	03112	Penangkapan dan Pengangkutan Ikan	Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan;
24	10/5/2023	PT. Usaha Jaya Putra Sundjoyo	Jalan. Penjajap Ujung Barat, No. 25, Desa/Kelurahan Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat	PMDN	03111	Penangkapan dan Pengangkutan Ikan	Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan;
25	11/5/2023	PT. Makmur Jaya Fishindo	Jalan. Mohammad Hambal No. 68, Desa/Kelurahan Pemangkat Kota, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat	PMDN	03111	Penangkapan dan Pengangkutan Ikan	Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan;
26	11/5/2023	PT. Ajin Liu Samudra	Jalan. Penjajap Barat, Desa/Kelurahan Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat	PMDN	03111	Penangkapan dan Pengangkutan Ikan	Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan;
27	11/5/2023	PT. Ajin Liu Samudra		PMDN	03113	Penangkapan dan Pengangkutan Ikan	Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan;
28	11/5/2023	PT. Ajin Liu Samudra		PMDN	50133	Penangkapan dan Pengangkutan Ikan	Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan;
29	31/5/2023	Herry Busani	Jalan Kom Yos Sudarso Gang. Salak IV No.8 Pontianak, desa/Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	PMDN	03111	Penangkapan dan Pengangkutan Ikan	Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan;
30	31/5/2023	Herry Busani	Jalan Kom Yos Sudarso Gang. Salak IV No.8 Pontianak, desa/Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	PMDN	03113	Penangkapan dan Pengangkutan Ikan	Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan;
31	31/5/2023	Firman Samsudin Als A Chen	Jalan Kom Yos Sudarso Gang. Salak IV No.8 Pontianak, desa/Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	PMDN	03111	Penangkapan dan Pengangkutan Ikan	Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan;
32			PMDN	03113	Penangkapan dan Pengangkutan Ikan	Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan;	
33	31/5/2023	PT. Samudra Mandiri Sentosa	Jalan Kom Yos Sudarso Gang. Salak IV No.8 Pontianak, Desa/Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Kota	PMDN	03113	Penangkapan dan Pengangkutan Ikan	Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan;
34			PMDN	50133	Penangkapan dan Pengangkutan Ikan	Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian	

			Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat				permasalahan perusahaan;
35				PMDN	03111	Penangkapan dan Pengangkutan Ikan	Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan;
36	31/5/2023	Joni	Jalan Kom Yos Sudarso Gang. Salak IV No.8 Pontianak, desa/Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	PMDN	50113	Penangkapan dan Pengangkutan Ikan	Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan;
37				PMDN	03113	Penangkapan dan Pengangkutan Ikan	Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan;
38				PMDN	03111	Penangkapan dan Pengangkutan Ikan	Pembinaan termasuk dalam rangka permasalahan perusahaan;
39	12/6/2023	PT Pulaumas Khatulistiwa	Jl. Khatulistiwa KM.6, Kel. Batulayang, Kec. Pontianak Utara, Kota	PMA	10293	Pengolahan dan Pemasaran Ikan	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha
40	12/6/2023	CV Dolphin	Jl. Khatulistiwa KM.6, Kel. Batulayang, Kec. Pontianak Utara, Kota	PMDN	10216	Pengolahan dan Pemasaran Ikan	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha
41				PMDN	10219	Pengolahan dan Pemasaran Ikan	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha
42	13/6/2023	Jainuddin	Gg. Sanjaya No. 51B Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota		03111	Penangkapan dan Pengangkutan Ikan	Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan;
43	13/6/2023			PMDN	03113	Penangkapan dan Pengangkutan Ikan	Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan;
44	15/6/2023	PT. Rejeki Nusantara Kita	Dusun Pelaik, Desa Singaraya, Kec. Semparuk, Kab. Sambas	PMDN	03111	Penangkapan dan Pengangkutan Ikan	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha;
45	2/8/2023	Lie Jong Tailan	GG.SANJAYA NO.51B, Kota Pontianak	PMDN	03111	Penangkapan dan Pengangkutan Ikan	Perbaikan
46				PMDN	03113		Perbaikan
47				PMDN	03113		Perbaikan
48	2/8/2023	Heng Hermansyah	JL. Purnama Komplek Angrek 1 NO.21-A, Kota Pontianak	PMDN	03111	Penangkapan dan Pengangkutan	Perbaikan
49				PMDN	03113		Perbaikan
50				PMDN	03113		Perbaikan
51	3/8/2023	PT. Segara Kencana Prima	Kota Pontianak, Kal-Bar	PMDN	03113	Penangkapan dan Pengangkutan	Perbaikan
52				PMDN	03113		Perbaikan
53				PMDN	03111		Perbaikan
54				PMDN	03111		Perbaikan
55				PMDN	03111		Perbaikan
56				PMDN	03111		Perbaikan
57	PMDN	03113	Perbaikan				
58	3/8/2023	Lim Ricky	JL. H. RAIS A. RAHMAN GG. NUSA NO. 20, Kota Pontianak Kalimantan Barat	PMDN	03113	Penangkapan dan Pengangkutan	Perbaikan
59				PMDN	03111		Perbaikan
60				PMDN	03113		Perbaikan
62	2/8/2023	Indra	JL. SUEZ PERMAI NO. 7 , Kota Pontianak Kalimantan Barat	PMDN	03111	Penangkapan dan Pengangkutan	Perbaikan
63				PMDN	03113		Perbaikan
64				PMDN	03113		Perbaikan

65	3/8/2023	Ngasino Hendra Ng	JL.Teuku Umar Gg.Buntu NO.52 G, Kota Pontianak	PMDN	03113	Penangkapan dan Pengangkutan	Perbaikan
66				PMDN	03111		Perbaikan
67	10/8/2023	Jong Ket	JL. Mohd Hambal NO. 131, Kab. Sambas Kalimantan Barat	PMDN	03111	Penangkapan dan Pengangkutan	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
68				PMDN	03111		Pembinaan
69				PMDN	03111		
70	10/8/2023	Ifan Willyanto	JL. MOH.Sohor, Kab. Sambas Kalimantan Barat	PMDN	03111	Penangkapan dan Pengangkutan	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
71				PMDN	03111		
72				PMDN	50133		
73	29/8/2023	Kampung Perikanan Budidaya Gabus	Desa Rungun Kecamatan Kotawaringin lama Kab. Kotawaringin Barat	PMDN	50133	Budidaya Perikanan	Pembinaan
74	29/8/2023	POKDAKAN Semitau Hulu Mandiri	jalan A.b Umar Juned Semitau Rt. 000/ Rw 001, Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau, Kab. Kapuas Hulu	PMDN	-	Budidaya Perikanan	Pembinaan
75	30/8/2023	Kelompok budidaya Semitau Hulu Sejahtera	jalan Angkasa RT 002 / RW 001 Kabupaten Kapuas Hulu	PMDN	-	Budidaya Perikanan	Pembinaan
76	11/8/2023	Andy Irwan	JL.Merdeka NO 9 Kabupate Sambas Kalimantan Barat	PMDN	03111	Penangkapan dan Pengangkutan	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha;
77				PMDN	03111	Penangkapan dan Pengangkutan	
78	11/8/2023	Tshiu Lang	JL.Tanjung Batu,KAB.Sambas Kalimantan Barat	PMDN	50133	Penangkapan dan Pengangkutan	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha;
79	11/8/2023			PMDN	03111		
80	11/8/2023			PMDN	03111		
81	11/8/2023	Kok Dju	Jl. Gajah Mada Komp. Surz Permai No. 7 Desa/ KElurahan. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan	PMDN	03113	Penangkapan dan Pengangkutan	Pembinaan

Pada Triwulan III tahun 2023 jumlah pengawasan lainnya terhadap unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, usaha budidaya perikanan dan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan sebanyak 81 lembaga dimana pengawasan yang dilakukan merupakan pengawasan lainnya. Pengawasan yang telah dilakukan disekitar wilayah Pontianak, kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas dan Kubu Raya sedangkan 1 pelaku usaha dilakukan di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah yaitu pengawasan kampung budidaya. Dari 81 kegiatan terdapat pelaku usaha yang telah tertib an taat peraturan, bebrapa pelaku juga diberikan Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan dan 1 diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis tahap I.

Untuk mencapai sasaran kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 339.930.000 dan sampai dengan 31 September 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 160,342,695 atau dengan realisasi 47,17%. Target yang tercapai dikarenakan pemeriksaan jumlah pelaku usaha dapat dilakukan karena lokasi pengawasan yang berdekatan seperti antara kota Pontianak dan Kubu Raya yang tidak terlalu jauh dari Stasiun PSDKP Pontianak seperti pengawasan usaha budidaya ikan dan unit pengolahan ikan. Tercapainya target tidak terlepas dari SDM pengawas perikanan yang berada di Stasiun PSDKP Pontianak dan tersebar di tiap Satwas/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Selain itu keberhasilan pencapaian target yang baik dikarenakan pada awal tahun 2023 tepatnya bulan Februari dilakukan pertemuan koordinasi Satwat/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dalam percepatan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan membahas perihal kegiatan teknis khususnya kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan. Kemudian setelah 3 bulan dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan pengawasan lewat daring dan luring lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dikoordinir oleh pelaksana koordinasi OPKP Stasiun PSDKP Pontianak. Dengan ini dapat dikatakan indikator kinerja ini telah berhasil pada Tahun 2023 dikarenakan telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 17. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW III 2020		TW III 2021		TW III 2022		TW III 2023		TW III 2024		
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
Persentase/jumlah penyelesaian pemeriksaan Pelaku Usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
% Capaian	100		100		100		100		100		

5. Persentase penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

Persentase Penyelesaian sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yaitu sanksi administratif yang diputuskan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan: a. UPT PSDKP untuk penerapan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah; b. Dit. PP (Pusat) untuk penerapan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin; c. UPT

PSDKP/Dit.PP untuk pengenaan sanksi administratif Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Perizinan Berusaha di Bidang Kelautan dan Perikanan, Pemanfaatan Ruang Laut Importasi Komoditas Perikanan dan Pergaraman, Penangkapan Ikan Terukur dan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Teguran/Paksaan); d. Dit.PP (Pusat) untuk Penetapan denda administratif, atau rekomendasi Pembekuan/pencabutan izin / pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP

Hasil Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan dapat dihitung berdasarkan rumus:

Hasil Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan dapat dihitung berdasarkan rumus berikut :

Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan

$$(xc) = \left(\frac{a}{\sum b} \right) \times 100\%$$

Xc = Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan

a = Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan berdasarkan penetapan sanksi administratif

$\sum b$ = Total kasus pelanggaran sanksi administratif yang direkomendasikan dikenakan sanksi administratif

Apabila sudah ditetapkan target capaian pertriwulan pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dan tidak ada kasus terkait sanksi administratif di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan.

Stasiun PSDKP Pontianak pada Triwulan III tahun 2023 telah menangani 8 kasus pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan. Dari 8 perkara tersebut yang telah dikenakan sanksi, kesemua 8 perkara sudah selesai proses penetapan dengan dikeluarkan susarat sanksi berupa teguran atau paksaan pemerintah tahap I. erdapat 1 perkara telah diberikan denda administrative. Dari hasil selesainya proses penanganan sanksi administrative didapat hasil sehingga capaian triwulann III ini sebesar 100% atau dengan persentase 120%. Capaian ini melebihi dari target yang telah ditentukan sebesar 70%. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 periode yang sama

karena IKU ini ditargetkan pada akhir tahun atau triwulan IV. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan 5 Tahun terakhir karena merupakan IKU yang dimulai pada tahun 2022. Rekapitulasi penyelesaian penanganan sanksi administratif dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 18. Rekapitulasi Penyelesaian Pengenaan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

NO	UNIT USAHA	JENIS PELANGGARAN	Lokasi	Keterangan
1	Robi Septiadi	Melakukan Pengiriman produk perikanan berupa kulit Hiu dan Pari tanpa dilengkapi dengan Surat Rekomendasi dan dukungan Health Certificate (HC)	Ketapang	Peringatan / Teguran Tertulis
2	Albert	Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks CITES	Seruyan	Peringatan / Teguran Tertulis
3.	PT. Welindo Erabadi Lojaya	Belum melengkapi SKP (surat Keterangan Pengolahan	Pontianak	Peringatan ke II
4	KM. Arif Wijaya Sukses	Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan yakni melakukan Penangkapan Ikan dengan menggunakan kapal Perikanan KM. Arif Wijaya Sukses yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor : 33.22.0001.134.59046, masa berlaku sampai 27 Januari 2023	Pontianak	Denda Administrasi Rp. 63.466.400
5	PT. Global Vannamei Sejahtera dan PT Multi Artha Samudra	Menggunakan obat ikan yang tidak terdaftarr pada Permen KKP Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Obat Ikan	Mempawah	Peringatan / Teguran tertulis
6	KM. Karunia Ilahi V	Melakukan kegiatan pengangkutan ikan tanpa dilengkapi Surat laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	Sambas	Peringatan / Teguran tertulis
7	PT. HF/ Tjhang Se Su	Melakukan kegiatan penerimaan komoditas perikanan impor yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang ditetapkan dalam dokumen rencana kebutuhan impor,	Singkawang	Peringatan / Teguran Tertulis
8	PT. Mulia Satwa Mandiri	sebagaimana ketentuan Pasal 294 jo. PP no. 27 tahun 2021	Pontianak	Peringatan / Teguran Tertulis

Keberhasilan IKU ini dikarenakan tidak terlepas dari kegiatan pengawasan yang dilakukan secara berkala atau terjadwal seperti pengawasan menggunakan kapal Pengawas dan sarana speed boat pengawasan dan pengawasan rutin kepada pelaku usaha seperti unit pengolahan ikan dan

pembudidayaan ikan. Selain itu penyelesaian kasus terkait pengenaan sanksi administratif oleh pengawas perikanan dan PPNS sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penanganan perkara sesuai dengan waktu yang diinginkan. Dalam mendukung pencaian IKU ini telah dianggarkan sebesar Rp. 87,000,000 sampai dengan 31 September 2023 telah realisasi sebesar Rp. 47,546,300 atau sebesar 54,65%. Indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil karena sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 19. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Penyelesaian Penanganan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW III 2020		TW III 2021		TW III 2022		TW III 2023		TW III 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Penyelesaian Pengenaan sanksi administratif	-	-	-	-	-	-	70	100	70	100
% Capaian	-		-		-		120		120	

6. Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Persentase Penyelesaian sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yaitu persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II).

Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang dihitung berdasarkan rumus berikut:

Persentase Penyelesaian Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan

$$(xa) = \left(\frac{a}{\sum b} \right) \times 100\%$$

xa = Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

a = Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan)(SP-3)

$\sum b$ = Total kasus Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah

Penyidikan sampai denganselesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan/atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan) (SP-3).

Apabila sudah ditetapkan target capaian pertriwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan. Apabila terdapat kasus yang di biayai oleh unit Satker pusat, maka perhitungan capaian kinerja di *claim* sebagai capaian unit kerja yang mebiayai dengan catatan di Stasiun PSDKP Pontianak dalam SPRINDIK terdapat PPNS Pusat dalam pelaksanaan penyidikan. Pada Triwulan III tahun 2023 telah menangani kasus TPKP sehingga didapat nilai realisasi sebesar 100% dimana lebih besar dari nilai target pada Triwulan III yaitu sebesar 70% atau capaian sebesar 120%. Capaian pada IKU Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak apabila dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2022 lebih besar dari capaian pada periode yang sama sebesar 92% sedangkan pada periode Triwulan III tahun 2021 sebesar 100%. Artinya capaian Triwulan III tahun 2023 sama apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021. IKU ini merupakan IKU yang ada pada tahun 2020-2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan pencapaian IKU 5 tahun terakhir. Rekapitulasi kegiatan penanganan perkara lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 20. Perkembangan Proses Hukum Tindak Pidana Perikanan Sampai Dengan Bulan September 2023

No	Nama Kapal (Kebangsaan)	Nahkoda (Kebangsaan)	Tgl. Penangkapan	Jenis Pelanggaran	Proses Hukum sampai dengan Bulan September 2023	Ket
1	Sampan lepeh Tanpa Nama	Alan Bin Uldi (Indonesia)	22 Juni 2023	Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan setrum dan menggunakan sarana berupa perahu kayu dengan mesin	Tahap II	-
2	KM. Wulandari	Sulaiman (Indonesia)	7 Agt 2023	Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat	Tahap II	

				tangkap yang dilarang dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yaitu jenis TRAWL di WPPNRI 711 tanpa dilengkapi dengan perijinan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)		
3	Sampan Motor Bermesin	Toni Indonesia)	18 Agt 2023	Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Peralatan Setrum yang dilarang dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan	Tahap II	

Capaian yang telah dicapai melebihi dari target yang ditentukan dikarenakan yaitu sampai dengan Triwulan III Stasiun PSDKP Pontianak tidak lain merupakan bentuk dari hubungan yang baik antara Stasiun PSDKP Pontianak dengan penegakan hukum terkait seperti Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Negeri Pontianak dan *stakeholder* lainnya seperti Saksi Ahli, Juru Bahasa dan lainnya sehingga proses dari penyidikan tersebut selesai dengan waktu yang ditentukan. Adapun Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2023 mendapat pagu sebesar Rp. 217.980.000 untuk penyidikan TPKP sampai dengan 31 September 2023 telah realisasi anggaran sebesar 27.748.000 atau sebesar 12,73%. Realisasi Anggaran masih relatif kecil hal ini dikarenakan sedang dalam proses pelaporan dan pengumpulan bukti SPj sebagai kelengkapan penggunaan anggaran. Pagu anggaran akan dapat diserap secara optimal pada triwulan IV dimana ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan tersebut.

Tabel 21. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW III 2020		TW III 2021		TW III 2022		TW III 2023		TW III 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	100	100	65	100	75	92	70	100	70	100
% Capaian	100		120		120		120		100	

7. IKU (Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (indeks)

Pemenuhan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan pada Triwulan III Tahun 2023 terealisasi sebesar 89,55 dari target yang telah ditetapkan pada Triwulan III tahun 2023 yaitu sebesar 80 atau dengan presentase 113,98%. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 dan 2021 mengalami penurunan dimana capaian pada Triwulan III Tahun 2022 yaitu sebesar 91,19 dan tahun 2021 sebesar 92,21. IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2020 karena pada periode tersebut belum terdapat capaian karena capaian pada triwulan IV. IKU ini juga tidak dapat Apabila dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena ini merupakan IKU baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi telah melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yaitu SLO (Surat Laik Operasi). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei kepuasan masyarakat dilakukan pada Triwulan III ini atau setahun sebanyak 4 kali dalam setahun.

Keberhasilan indikator kinerja ini dikarenakan langkah Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan telah memanfaatkan kanal-kanal yang telah ada baik melalui kotak pengaduan yang telah ada di masing masing kantor layanan di setiap Satwas dan Wilker PSDKP, mensosialisasikan nomor kontak pengaduan yang bisa dihubungi baik via telepon, sms maupun WhatsApp, yang bisa dimanfaatkan oleh penerima layanan dalam menyampaikan aduan, saran, dan masukan melalui website: lapor.go.id dan kkp.go.id/djpsdkp/stasiunpontianak. Respon dalam penanganan aduan, saran, dan masukan juga dipercepat dengan telah membentuk tim khusus dalam penanganan aduan, saran, dan masukan Pemberian pelatihan/bimbingan teknis kepada petugas pelayanan telah berpengaruh baik dan dirasakan oleh pengguna layanan. Hal juga ini disebabkan

oleh petugas pelayanan telah menerapkan Budaya Pelayanan 7S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, Sigap dan Syukur) dan menerapkan Motto Pelayanan MANTAP (Mudah, Akuntabel, Nyaman, Transparant, Adil, Profesional pada saat melakukan pelayanan kepada pengguna layanan Pelayanan di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Pelayanan selama ini yang telah berjalan adalah 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam sepekan atau nonstop setiap hari sehingga sewaktu-waktu nelayan atau pengusaha membutuhkan SLO dapat dilayani langsung oleh petugas yang ada di setiap kantor layanan. Hal tersebut termasuk pengejawantahan standar pelayanan yang telah disepakati oleh penyedia layanan (Stasiun PSDKP Pontianak) dengan pemanfaat layanan (Pelaku Usaha) bahwa Standar Pelayanan SLO adalah 90 menit Sistem, Mekanisme, dan Prosedur sudah ditetapkan oleh Stasiun PSDKP Pontianak dalam bentuk SOP yang telah disosialisasikan dan ditempel di setiap kantor layanan di setiap Satwas dan Wilker PSDKP. Pengguna layanan akan terus diberikan pemahaman bahwa petugas pelayanan publik selama ini dalam menjalankan tugasnya telah menerapkan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur yang sudah ditetapkan di setiap kantor pelayanan telah tersedia sarana dan prasarana yang mendukung sebagai standar minimal kantor layanan seperti kursi, meja, perangkat komputer dan alat tulis kantor penunjang, alat peraga dan papan informasi, ruangan yang nyaman dan toilet yang bersih. Stasiun PSDKP Pontianak akan tetap terus meningkatkan sarana dan prasarana di seluruh wilayah Satwas dan Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TRIWULAN III TAHUN 2023			
NILAI IKM	NAMA LAYANAN:	PENERBITAN SLO	
		RINCIAN	
89.55	JUMLAH RESPONDEN	545	Orang
	JENIS KELAMIN	L	545
		P	12
	PENDIDIKAN	SD	245
		SMP	93
		SMA	199
		D3	0
		S1	20
		S2	0
		S3	0
PERIODE SURVEY :	7 Juli - 27 September 2023		
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT			

Gambar 5. Perhitungan SKM SLO (Surat Laik Operasi)

Tabel 22. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW III 2020		TW III 2021		TW III 2022		TW III 2023		TW III 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	87,92	80	92,21	80	91,19	80	89,55	80	89,55
% Capaian	-		115,26		113,98		111,94		111,94	

8. IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (indeks)

Pemenuhan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak pada Triwulan III Tahun 2023 terealisasi sebesar 90,41 dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 80 atau dengan presentase capaian 113,01%. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 mengalami penurunan dimana capaian pada tahun 2021 pada periode sama yaitu sebesar 93,30. Capaian mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 pada periode yang sama yaitu sebesar 90,22. Indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir karena merupakan indikator kinerja baru yaitu indikator ini dimulai pada tahun 2021. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi telat melebihi dari target yang sudah ditentukan Pencapaian tersebut dapat dilihat pada Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yaitu LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei kepuasan masyarakat dilakukan setiap Triwulan III ini atau selama tahun 2023 sebanyak 4 kali dengan ini indikator kinerja dapat dikatakan berhasil dikarenakan telah melampaui target.

Keberhasilan indikator kinerja ini dikarenakan langkah Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan telah memanfaatkan kanal-kanal yang telah

ada baik melalui kotak pengaduan yang telah ada di masing masing kantor layanan di setiap Satwas dan Wilker PSDKP, mensosialisasikan nomor kontak pengaduan yang bisa dihubungi baik via telepon, sms maupun WhatsApp, yang bisa dimanfaatkan oleh penerima layanan dalam menyampaikan aduan, saran, dan masukan melalui website: lapor.go.id dan kkp.go.id/djpsdkp/stasiunpontianak. Respon dalam penanganan aduan, saran, dan masukan juga dipercepat dengan telah membentuk tim khusus dalam penanganan aduan, saran, dan masukan Pemberian pelatihan/bimbingan teknis kepada petugas pelayanan telah berpengaruh baik dan dirasakan oleh pengguna layanan, hal ini juga disebabkan oleh petugas pelayanan telah menerapkan Budaya Pelayanan 7S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, Sigap dan Syukur) dan menerapkan Motto Pelayanan MANTAP (Mudah, Akuntabel, Nyaman, Transparant, Adil, Profesional pada saat melakukan pelayanan kepada pengguna layanan Pelayanan di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Pelayanan Selama ini yang telah berjalan adalah 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam sepekan atau nonstop setiap hari sehingga sewaktu-waktu nelayan atau pengusaha membutuhkan SLO dapat dilayani langsung oleh petugas yang ada di setiap kantor layanan. Hal tersebut termasuk pengejawantahan standar pelayanan yang telah disepakati oleh penyedia layanan (Stasiun PSDKP Pontianak) dengan pemanfaat layanan (Pelaku Usaha) bahwa Standar Pelayanan LVHPI adalah 75 menit, Mekanisme, dan Prosedur sudah ditetapkan oleh Stasiun PSDKP Pontianak dalam bentuk SOP yang telah disosialisasikan dan ditempel di setiap kantor layanan di setiap Satwas dan Wilker PSDKP. Pengguna layanan akan terus diberikan pemahaman bahwa petugas pelayanan publik selama ini dalam menjalankan tugasnya telah menerapkan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur yang sudah ditetapkan di setiap kantor pelayanan telah tersedia sarana dan prasarana yang mendukung sebagai standar minimal kantor layanan seperti kursi, meja, perangkat komputer dan alat tulis kantor penunjang, alat peraga dan papan informasi, ruangan yang nyaman dan toilet yang bersih.

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)				
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK				
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
TRIWULAN III TAHUN 2023				
NILAI IKM	NAMA LAYANAN:	PENERBITAN LVHPI		
90.41	RINCIAN			
	JUMLAH RESPONDEN	175	Orang	
	JENIS KELAMIN	L	171	
		P	4	
	PENDIDIKAN	SD	58	
		SMP	31	
		SMA	78	
D3		3		
S1		5		
S2		0		
	S3	0		
PERIODE SURVEY :		10 Juli - 18 September 2023		
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT				

Gambar 6. Perhitungan SKM LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan)

Tabel 23. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW III 2020		TW III 2021		TW III 2022		TW III 2023		TW III 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	80	93,30	80	90,22	80	90,41	80	90,41
% Capaian	-		116,62		112,77		113,01		113,01	

9. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan

anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian. Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Formula:

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

- X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko
- a = Dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko yang dipenuhi
- b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

Perhitungan capaian Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sampai dengan 31 Maret tahun 2023 mengadopsi dari data yang diberikan oleh Eselon I yaitu dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 sebesar 100% mencapai dari target yang ditetapkan pada Triwulan III tahun 2023 yaitu sebesar 100%. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan Capaian pada tahun 2022 pada periode yang sama karena indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru yang dimulai pada tahun 2023, indikator kinerja ini juga tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun terakhir. Tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan Stasiun PSDKP Pontianak telah Menyusun Laporan SPIP tahun 2022 dan telah dilaporkan secara berjenjang dan tepat waktu. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko melalui Form

Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Penyusunan Dokumen Manajemen Resiko di tiap bidang juga telah dilakukan antara lain Manajen Resiko bagian Tata Usaha, Manajen resiko bagian sarana dan Prasarana dan manajemen resiko tata usaha. Selain itu pegawai di tiap-tiap bidang telah mengikuti workshop dalam penyusunan dokumen manajemen resiko. Dengan demikian indikator kinerja ini telah tercapai yang mana telah mecapai dari target yang telah ditentukan pada triwulan III. Berikut Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko dengan hasil pada tabel berikut:

Tabel 24. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

No	Satuan Kerja	Rencana Pengendalian Risiko	Realisasi Pengendalian Risiko	Persentase Capaian IKU MR
1	Stasiun PSDKP Pontianak	23	23	100

Perbandingan Pencapaian Indikator Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 25. Perbandingan Target dan Capaian pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW III 2020		TW III 2021		TW III 2022		TW III 2023		TW III 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
% Capaian	-		-		-		100		100	

10. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu: Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim,

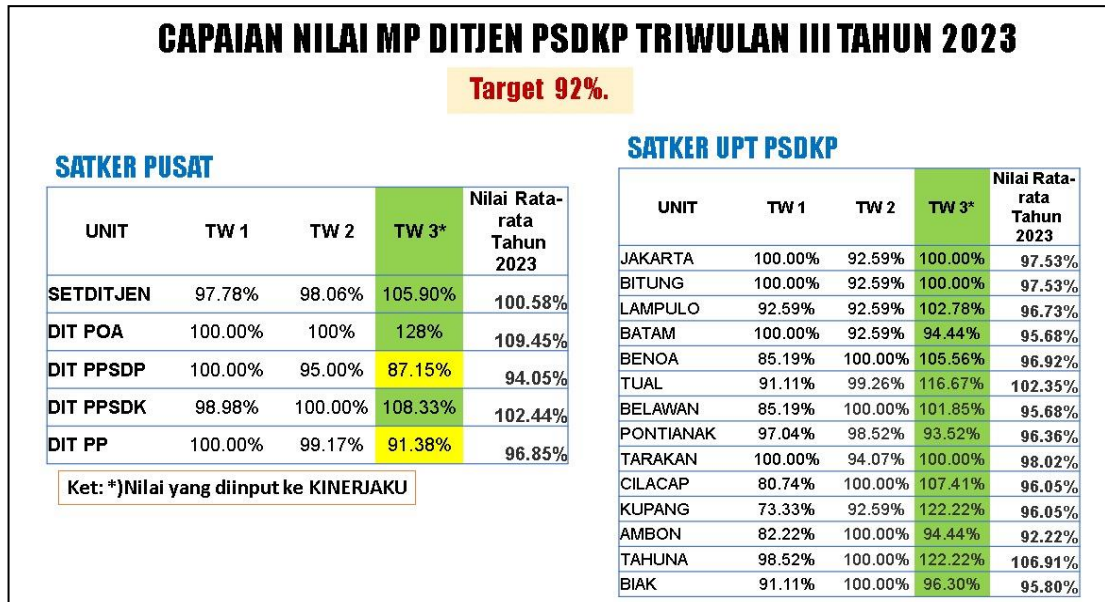
Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja, Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV, Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf

Untuk mengukur indikator kinerja ini yaitu Keikutsertaan (Persentase pejabat dan staf yang tergabung dalam aplikasi *collaboration office*); c) Keaktifan (upload dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto video, jurnal dan info grafis bersifat boleh dipublikasikan dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5W1H);

Cara Mengukur :a) Menggunakan *collaboration office*; b) Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target yang telah ditetapkan; c) Pengukuran, Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan, Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal 6 (enam) kali upload informasi beserta dokumentasi setiap 1 informasi bernilai 0,5. Untuk konten video/jurnal diharapkan bersifat edukasi atau ajakan, yang di upload minimal satu kali dalam triwulan yang bernilai 3. Untuk info grafis bernilai 1 untuk 1 kali postingan, Maksimal nilai yang dapat diterima adalah 4 sedangkan Nilai minimal yang wajib dipenuhi dalam 1 triwulan adalah 3. Target pertahun sebesar 92% untuk perhitungan capaian presentase unit kerja Stasiun PSDKP Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar sampai dengan 31 September tahun 2023 mengadopsi dari data yang diberikan oleh Eselon I yaitu dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 sebesar 93,52% melebihi dari target yang ditetapkan pada Triwulan III tahun 2023 yaitu sebesar 92%. Apabila dibandingkan dengan Capaian pada tahun 2022, indikator kinerja ini mengalami penurunan karena Capaian pada Triwulan III tahun 2022 tercapai sebesar 98,06%. Walauoun terjadinya penuruanan tetapi IKU ini telah tercapat dari target yang ditentukan, maka dengan ini dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi telah melebihi dari target. Indikator kinerja ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir.

Target indikator kinerja ini dapat dicapai dan melampaui target yang ditentukan dikarenakan adanya keikutsertaan dari Pejabat struktural sebanyak 2 orang, pelaksana koordinasi sebanyak 2 orang dan staff sebanyak 6 orang. keaktifan pejabat dan staf Stasiun PSDKP Pontianak dalam aplikasi *collaboration office* ternilai maksimal karena secara reguler dilakukan evaluasi terhadap postingan bulanan Stasiun PSDKP Pontianak pada aplikasi *collaboration office* sebagai rincian capaian indikator kinerja ini. Capaian indikator kinerja unit kerja

yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 7. Capaian IK unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Nilai Manajemen pengetahuan yang terstandar pada Triwulan III tahun 2023 Stasiun Pontianak mendapatkan hasil yang cukup baik karena melebihi target selain itu juga ada beberapa unit kerja PSDKP yang belum mendapatkan nilai maksimal atau dibawah dari target sebesar 92%.

Tabel 26. Perbandingan Target dan Capaian Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW III 2020		TW III 2021		TW III 2022		TW III 2023		TW III 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	75,56	84	97,11	86	98,06	92	93,52	92	93,52
% Capaian	-		115,6		114,02		101,65		101,65	

11. IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

Indikator kinerja ini merupakan jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2020 (TW IV tahun sebelumnya) s.d 31 September 2021 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Target Indikator Kinerja ini lingkup Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2023 sebesar 75%. Sampai 31 September tahun 2023 data hasil sebesar 75% dikarenakan Stasiun PSDKP Pontianak pada perhitungan Triwulan III tidak adanya temuan sehingga capaian 75% sama dengan target Triwulan III yaitu sebesar 75% dengan persentase capaian 100%. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi telah mencapai dari target yang sudah ditentukan. Indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2022 sama dengan persentase 100%. Indikator kinerja ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 dan 5 tahun terakhir karena merupakan indikator kiner baru yang dimulai tahun 2022. Tercapainya indikator ini dikarenakan tidak terlepas dari Stasiun PSDKP Pontianak yang secara renponsif menindak lanjuti rekomendasi yang diberikan dalam perbaikan kinerja organisasi dimulai dari pimpinan sampai diturunkan pada pegawai dibawahnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan kinerja yang lebih baik. Capaian hasil persentase Jumlah rekomendasi Hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 27. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan

Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
Stasiun PSDKP Pontianak	0	0	-	0	-

Perbandingan Pencapaian Indikator Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan dapat disajikan pada tabel berikut; Tabel 28. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan

INDIKATOR KINERJA	TW III 2020		TW III 2021		TW III 2022		TW III 2023		TW III 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan	-	-	-	-	70	70	75	75	75	75
% Capaian	-				100		100		100	

Untuk mencapai Sasaran Strategis 8 ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 16.769.421.000. dan sampai dengan 31 september 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 11.340.370.280 atau sebesar 67,63%. Tercapainya target indikator kinerja ini pada Triwulan III tahun 2023 disebabkan oleh optimalnya realisasi anggaran dengan diimbangi pencapaian optimal terhadap target output yaitu pada kegiatan teknis dan dukungan manajemen perkantoran.

3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak dengan Satker UPT Sejenis/Setara

Stasiun PSDKP Pontianak pada Triwulan III tahun 2023 telah membandingkan hasil capaian kinerja baik indikator kinerja utama maupun indikator kinerja manajerial dengan Satuan kerja UPT setara/ sejenis. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dibandingkan sebanyak 11 IKU. Adapun capaian Stasiun PSDKP Pontianak bila dibandingkan dengan hasil capaian kinerja Triwulan III tahun 2023 dengan 7 (tujuh) UPT satker setara/ sejenis, sebagai berikut;

1. IKU Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	87,6	100	114,15
2	Stasiun PSDKP Biak	87,6	100	114,15
3	Stasiun PSDKP Ambon	87,6	100	114,15
4	Stasiun PSDKP Tahuna	87,6	100	114,15
5	Stasiun PSDKP Pontianak	87,6	99,07	113,09
6	Stasiun PSDKP Belawan	87,6	100	114,15

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
7	Stasiun PSDKP Kupang	87,6	100	114,15
8	Stasiun PSDKP Tarakan	87,6	100	114,15

2. IKU Indeks Kinerja Operasional *Speedboat* Pengawas (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	87,6	100	114,15
2	Stasiun PSDKP Biak	87,6	100	114,15
3	Stasiun PSDKP Ambon	87,6	92,41	105,49
4	Stasiun PSDKP Tahuna	87,6	100	114,15
5	Stasiun PSDKP Pontianak	87,6	100	114,15
6	Stasiun PSDKP Belawan	87,6	100	114,15
7	Stasiun PSDKP Kupang	87,6	100	114,15
8	Stasiun PSDKP Tarakan	87,6	100	114,15

3. IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	90	90
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100

4. IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100

5. IKU Persentase efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan Perikanan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian	Keterangan
1	Stasiun PSDKP Cilacap	40	100	250	
2	Stasiun PSDKP Biak	-	-	-	Tidak terdapat target
3	Stasiun PSDKP Ambon	40	40	100	
4	Stasiun PSDKP Tahuna	40	100	250	
5	Stasiun PSDKP Pontianak	40	40	100	
6	Stasiun PSDKP Belawan	40	100	250	
7	Stasiun PSDKP Kupang	40	40	100	
8	Stasiun PSDKP Tarakan	40	40	100	

6. IKU Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian	Keterangan
1	Stasiun PSDKP Cilacap	40	97,32	243	
2	Stasiun PSDKP Biak	-	-	-	Tidak terdapat target
3	Stasiun PSDKP Ambon	40	40	40	
4	Stasiun PSDKP Tahuna	40	40	40	
5	Stasiun PSDKP Pontianak	40	60	150	
6	Stasiun PSDKP Belawan	40	100	250	
7	Stasiun PSDKP Tarakan	40	100	250	
8	Stasiun PSDKP Kupang	40	40	100	

7. IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	92,60	115,75
2	Stasiun PSDKP Biak	80	93,97	117,46
3	Stasiun PSDKP Ambon	80	90,94	113,67
4	Stasiun PSDKP Tahuna	80	89,79	112,23
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	91,06	113,82
6	Stasiun PSDKP Belawan	80	89,48	111,85
7	Stasiun PSDKP Kupang	80	95,35	119,18
8	Stasiun PSDKP Tarakan	80	90,69	112,50

8. IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian	Keterangan
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	98,31	122,88	
2	Stasiun PSDKP Biak	80	-	-	Tidak terdapat target
3	Stasiun PSDKP Ambon	80	90,88	113,60	
4	Stasiun PSDKP Tahuna	80	-	-	Tidak terdapat target
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	92,39	115,48	
6	Stasiun PSDKP Belawan	80	90,10	90,10	
7	Stasiun PSDKP Kupang	80	99	112,62	
8	Stasiun PSDKP Tarakan	80	90,48	113,10	

9. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100
7	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100
8	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100

10. IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	92	80,74	87,76
2	Stasiun PSDKP Biak	92	91,11	99,03
3	Stasiun PSDKP Ambon	92	82,22	89,37
4	Stasiun PSDKP Tahuna	92	98,52	107,09
5	Stasiun PSDKP Pontianak	92	97,04	105,48
6	Stasiun PSDKP Belawan	92	85,19	92,60
7	Stasiun PSDKP Tarakan	92	100	108,70
8	Stasiun PSDKP Kupang	92	73,33	79,71

11. IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	75	75	100
2	Stasiun PSDKP Biak	75	75	100
3	Stasiun PSDKP Ambon	75	75	100
4	Stasiun PSDKP Tahuna	75	75	100
5	Stasiun PSDKP Pontianak	75	75	100
6	Stasiun PSDKP Belawan	75	75	100
7	Stasiun PSDKP Tarakan	75	75	100
8	Stasiun PSDKP Kupang	75	75	100

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak diperoleh dari agregasi 5 mata anggaran kegiatan Tahun 2023, yaitu: ⁽¹⁾ Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas; ⁽²⁾ Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan; ⁽³⁾ Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan; ⁽⁴⁾ Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan; ⁽⁵⁾ Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP, dengan hasil pengukuran sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 29. Rincian Realisasi Anggaran

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				(Rp)	%
1.	2350	Pemantauan dan Operasi Armada	28.116.552.000	17.442.456.434	62,04
2.	2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	406.200.000	161.140,500	39,67
3.	2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	286.152.000	103.981.800	36,34
4.	2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	339.930.000	157.792.695	46,42
5.	2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	16.771.275.000	10.753.201.858	64,12
Total			45.920.109.000	28.618.573.287	62,32

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak pada Tahun 2023 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA- 032.05.2.440847/2023 tanggal 18 November Tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.37.963.000,- (Empat Puluh Satu Miliar Seratur Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah). Sedangkan untuk berdasarkan revisi anggaran terakhir sebesar Rp. 45.920.109.000 (Empat Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah) Berdasarkan data dari OMSPAN sampai tanggal 30 September tahun 2023 dimana realisasi anggaran yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebesar 62,32% atau sebesar Rp. 28.618.573.287,- (Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

Capaian anggaran yang mencapai tergolong rendah karena dibawah dari 75% hal ini disebabkan akselerasi pelaksanaan kegiatan dengan alokasi anggaran yang besar yang tidak terlaksana sesuai dengan rencana penarikan dana. Adaanya beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan namun progres pengumpulan bukti SPj masih dalam proses sehingga baru terlihat realisasinya pada TW IV. Adanya Penyesuaian teknis pengawasan SDKP terhadap implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (Perdirjen PSDKP No.06 tahun 2021. Penyesuaian jadwal pengawasan berbasis OSS lingkup Stasiun PSDKP Pontianak pada Triwulan III Tahun 2023 juga belum optimal sehingga belum maksimalnya penggunaan anggaran melalui koordinasi bersama para pengelola anggaran baik yang ada di Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak maupun

Satwas SDKP di Bawahnya. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang secara langsung berkontribusi dalam serapan anggaran dilakukan secara reguler oleh seluruh perangkat Stasiun pengawasan SDKP Pontianak Rincian serapan anggaran tiap bulan dalam periode Triwulan III Tahun 2023.

4.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan III Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam capaian strategis Stasiun PSDKP Pontianak pada periode Triwulan III tahun 2023, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian indikator kinerja tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan.
2. Dari 22 Indikator kinerja Keseluruhan sebanyak 11 (sebelas) Baik Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Manajerial yang dilakukan pengukuran pada Triwulan III dan dapat mencapai target dengan nilai capaian sasaran 109,36%.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja Stasiun PSDKP Pontianak pada Triwulan III Tahun 2023, maka untuk triwulan berikutnya perlunya peningkatan capaian dalam waktu yang sedini mungkin mempertimbangkan asas akuntabilitas. Selain itu ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan menjadi perbaikan pada periode berikutnya dapat jelaskan pada pada tabel berikut:

Tabel 30. Rekomendasi dan tindak lanjut hasil capaian

No	Hal yang Harus Menjadi perhatian	Permasalahan	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	Capaian IKU MP Terstandar	Nilai Capaian IKU MP terstandar sebesar 93,53%, dimana nilai sangat mendekati dari target sebesar 92	Meningkatkan Capaian pada periode berikutnya	- Meningkatkan postingan kegiatan pada platform <i>collaboration office</i> Kepada anggota yang berkewajiban

LAMPIRAN. PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Abdul Quddus**
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak

Abdul Quddus

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
1.1	Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif	1.1.1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (Indeks)	80
1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif	1.2.1	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	87,6
		1.2.2	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	87,6
1.3	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan	1.3.1	Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP (%)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
2.1	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan yang Sesuai Ketentuan	2.1.1	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (%)	100
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
3.1	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan yang Sesuai Ketentuan	3.1.1	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (%)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas	4.1.1	Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (%)	80
4.2	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas	4.2.1	Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (%)	93
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
5.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP	5.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Surat Lalk Operasi (SLO) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	80
		5.1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPi (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	80
		5.1.3	Nilai WBK Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	75
		5.1.4	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	
		5.1.5 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	78
		5.1.8 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	90
		5.1.7 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		5.1.8 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	21
		5.1.9 Jumlah Inovasi yang Dihasilkan Stasiun PSDKP Pontianak (Inovasi)	1
		5.1.10 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	92
		5.1.11 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	77,5
		5.1.12 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	77,5
		5.1.13 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	89
		5.1.14 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	622.564.000
Kegiatan 2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	657.000.000
Kegiatan 3	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	22.758.645.000
Kegiatan 4	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	406.200.000
Kegiatan 5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	16.693.554.000
Total Anggaran		41.137.963.000

Jakarta, 17 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak



Abdul Qudus